

BAB II

PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN

A. Politik PKI di Indonesia

1. Komunisme di Indonesia

Komunisme di Indonesia dimulai dengan datangnya benih-benih paham tersebut yang dibawa ke Indonesia dengan nama "Sosial Demokrat" pada tahun 1913 oleh seorang pemimpin buruh negeri Belanda bernama Hendricus Yosephus Fransiscus Marie Sneevliet. Ia adalah anggota Sosial Demokratische Arbeiderspartij (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat.¹

Sosial Demokrat adalah nama ajaran komunis yang telah berkembang di Eropa Barat, sebagaimana dikatakan oleh Sayuti Melik dalam tulisannya yang berjudul "Marxisme-Leninisme yang menyesatkan di Indonesia" bahwa :

"Ajaran "Manifesto Komunis" itu di Eropa Barat sendiri telah berkembang dan berganti nama. Tidak lagi mempergunakan nama "Komunis" melainkan mempergunakan nama "Sosial Demokrat".²

Pada tanggal 9 Mei 1914 Sneevliet bersama orang-orang sosialis lainnya berhasil mendirikan organisasi Sosial Demokrat di Indonesia diberi nama Indische Sosial Demokratische Vereniging (terkenal dengan ISDV). Para pemimpin ISDV menganggap lebih efektif untuk bersekutu dengan organisasi-organisasi massa lainnya agar organisasinya bisa berkembang dan berakar didalam masyarakat Indonesia. Maksud tersebut bisa tercapai dengan berhasilnya ISDV menyusup kedalam Sarekat Islam di Semarang yang pada waktu itu dipimpin oleh Semaun.

¹Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jil.V, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal.203

²Sayuti Melik, "Marxisme-Leninisme Yang Menyesatkan di Indonesia", Surabaya Post (Surabaya , 9 Oktober 1981), hal.6

Tahun 1917 Partai Sosial Demokrat Rusia berhasil memberontak terhadap kekuasaan Tsar dan mendirikan Negara Sovyet yaitu pemerintahan rakyat yang terdiri dari kaum buruh, petani dan dewan-dewan prajurit.³ Pada kongres Sosial Demokrat yang ketiga tahun 1918 diputuskan mengganti nama "Sosial Demokrat" menjadi "Komunis" dan organisasi dunianya dinamakan "Komunis Internasional" disingkat "Komintern".⁴

Ketika Partai Buruh Sosial Demokrat di Belanda (SDAP) merubah namanya menjadi Partai Komunis Belanda (CPN), beberapa anggota bangsa Eropa dalam ISDV mengusulkan untuk mengikuti jejak itu. Maka pada bulan Mei 1920 dalam kongres ISDV ketujuh dibicarakan usul penggantian nama ISDV menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Hal ini menurut Semaun untuk membedakan diri dengan kaum sosialis palsu dan mengidentifikasikan diri dengan komintern. Kemudian ISDV merubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia pada tanggal 23 Mei 1920 dan pada bulan Desember tahun yang sama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berafiliasi dengan komintern.⁵

Dengan demikian sejak berdirinya, PKI mengikuti strategi komintern. Dalam Sejarah Nasional Indonesia dinyatakan sebagai berikut : "Afiliasi dengan Komintern menyebabkan PKI harus menyesuaikan sikapnya sesuai dengan garis politik Asia dari pada Komintern".⁶ Adapun perjuangan untuk mencapai negara komunis masih menurut jalan pemikiran pemimpin-pemimpin komunis di Indonesia sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Sayuti Melik :

"Dapat dinyatakan, bahwa gerakan PKI dari tahun 1920 s.d. tahun 1926 itu berjalan menurut jalan pemikiran pemimpin-pemimpin komunis di Indonesia sendiri, dalam melaksanakan

³ Ensiklopedi Umum (Jakarta : Penerbitan Yayasan Kanisius, 1977), hal.946

⁴ Sayuti Melik, Loc.Cit.

⁵ Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Op.Cit. hal.208

⁶ Loc.Cit.

ajaran Marxisme-Leninisme di Indonesia. Belum ada perintah atau komando dari komintern atau dari Rusia. Hanya melanjutkan apa yang telah diajarkan oleh ISDV dulu, ditambah dengan Marxisme-Leninisme itu".⁷

Dengan perubahan nama menjadi PKI, pola kerja sama dengan Sarekat Islam masih berlanjut. Akan tetapi karena perbedaan landasan dan arah perjuangan yang tidak mungkin bisa dipertemukan maka perpecahan tidak bisa dihindarkan yaitu dengan terciptanya SI putih dan SI merah dalam tubuh SI.

Tan Malaka dari PKI berusaha untuk memperbaiki kembali kerja sama dengan Sarekat Islam, tetapi usaha ini gagal karena SI putih yang dipimpin oleh Tjokroaminoto melaksanakan disiplin partai, maka berakhirilah pengaruh PKI dalam SI.

Dengan kegagalan ini maka PKI mulai menggerakkan SI merah untuk menandingi SI putih dan mengganti nama SI merah menjadi Sarekat Rakyat yang akhirnya dilebur kedalam PKI. Sebagaimana dalam buku Pasang Naik Kulit Berwarna, dinyatakan sebagai berikut :

"...karena kenjataan pahit yang dihadapi P.K.I., P.K.I. mulai meninggalkan usahanya untuk mempengaruhi partai-partai lain; P.K.I. lebih suka kini untuk mengkonsolidir dirinya sendiri".⁸

Setelah PKI merasa dirinya sebagai partai terbesar dan kuat maka pada rapat CC PKI di Prambanan tahun 1925 memutuskan untuk mengadakan pemberontakan yang akan dicetuskan tahun 1926. Jika pemberontakan yang mereka rencanakan itu menang, maka akan meniru keberhasilan Revolusi Rusia pada tahun 1917, dengan mendirikan negara Sovyet Indonesia. Pemberontakan meletus pada tanggal 13 Nopember 1926 di Jakarta dengan merebut dan menduduki kantor tilpun dan tilgrap, tetapi beberapa jam kemudian bisa di-

⁷Sayuti Melik, Op.Cit. hal.7

⁸Muljadi Djojomartono H.M. es. (penterj.), L.Stoddard, Pasang Naik Kulit Berwarna, Suplemen (Jakarta : Menko Kesejahteraan, 1966), hal.295

rebut kembali oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan menyusul di Banten, Priangan, Solo, Kediri dan tempat-tempat lain yang bisa ditumpas dalam waktu satu minggu.⁹ Kemudian pemerintah Belanda mengadakan tindakan terhadap PKI diseluruh Indonesia dengan mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh pemberontak kemudian dipenjarakan dan sebagian dibuang ke Digul, Irian Jaya. Oleh Arnold C. Brackman dikatakan bahwa seluruhnya yang ditangkap 13.000 orang PKI. Yang digantung 9 orang sedangkan 5000 orang mendapat hukuman ringan dan 1308 orang dipenjarakan. Sebanyak 823 orang yang termasuk kelas berat diasingkan ke Tanah Merah Irian Barat.¹⁰ Dengan kegagalan pemberontakan 1926 itu maka berakhirilah kegiatan PKI. Dan sejak itu komunis dilarang. Akan tetapi orang-orang komunis bergerak secara rahasia.

Sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 barulah PKI muncul kembali secara terang-terangan, dengan gigih :

"Orang-orang komunis mencoba dengan susah payah merebut kepeloporan perjuangan dan menegaskan kepartaian mereka. Ternyata baru tiga tahun kemudian, 1 September 1948 dan setelah hampir seluruh daerah Indonesia kembali berhasil direbut oleh Belanda, mereka berhasil membentuk pimpinan partai".¹¹

Tak lama kemudian, pada tanggal 18 September 1948 PKI memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah RI dan rakyat Indonesia bergerak cepat menumpas pemberontakan PKI tersebut, hanya kurang lebih satu bulan. Akan tetapi pemerintah RI dihadapkan pada situasi dan kondisi yang membutuhkan persatuan dalam menghadapi agresi yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 sehing-

⁹ Suropto, Surat Perintah 11 Maret (Surabaya : PT GRIP, 1969), hal.5

¹⁰ Ibid, hal.7

¹¹ Jacques Leclerc, "Kondisi Kehidupan Partai", Prisma, 8 (Agustus, 1979), hal.48

ga tidak dapat menyelesaikan secara yuridis formal terhadap kejahatan PKI tersebut. Oleh sebab itu banyak tokoh-tokohnya yang bisa meneruskan usaha mereka untuk menghidupkan PKI di Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 berdirilah secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan dengan UUD '45 tetapi dengan UUDS 1950. Sistem pemerintahannya Kabinet Parlementer dan cara bekerjanya mengikuti paham liberal. Dalam situasi yang liberal ini PKI dapat terang-terangan hidup kembali. Kurang lebih lima belas tahun kemudian, tepatnya tanggal 30 September 1965 PKI melanggar kebiadabannya kembali dengan mengadakan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pemberontakan inipun dapat ditumpas oleh pemerintah bersama rakyat Indonesia.

Rakyat Indonesia menuntut dibubarkannya PKI. Pada tanggal 5 Oktober 1965 Partai Nahdlatul Ulama pertama kali menuntut pembubaran itu yang kemudian diikuti Angkatan 1966 dengan Trituranya. Pada tanggal 11 Maret dikeluarkan Surat Perintah Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS kepada Letnan Jendral TNI Soeharto, yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah itu sebagai berikut :

Presiden Republik Indonesia.
Surat Perintah.

1. Mengingat :
 - 1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun internasional.
 - 1.2. Perintah Marjan Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.
2. Menimbang :
 - 2.1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintahan dan djalannja Revolusi.
 - 2.2. Perlu adanya djaminan keutuhan pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pe-

mimpin Besar Revolusi serta segala adja-
ran-2 nya.

III. Memutuskan/Memerintahkan :

Kepada : Letnan Djendral Suharto, Menteri Panglima Angkatan Darat.

Untuk : Atas nama Presiden / Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terdjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden / Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi / Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima 2 Angkatan2 lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaja melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas.

Djakarta, 11 Maret 1966.

Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/
Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS

Sukarno¹²

Kemudian Suharto dengan Surat Perintah 11 Maret nya mem-
bubarkan PKI beserta organisasi-organisasi massanya atau yang
berafiliasi kepada PKI. Pada waktu MPRS mengadakan Sidang Umum-
nya yang keempat mempertegas tindakan Suharto dengan Ketetapan
MPRS XXV yang berisi empat pasal sebagai berikut :

Pasal 1 : MPRS menerima baik dan menguatkan keputusan
Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Pemimpin Besar
Revolusi/Mandataris MPRS berupa pembubaran Par-
tai Komunis Indonesia, termasuk bagian organisa-

¹²Soeripto, Op.Cit. hal.74

sinja dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung, ber-naung dibawahnja dan pernjataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara RI bagi Partai Komunis Indonesia yang dituangkan dalam keputusannja tanggal 12 Maret no. 1/3 1966 meningkatkan kebidjaksanaan diatas menjadi ketetapan MPRS.

Pasal 2 : Setiap kegiatan di Indonesia untuk menjebarakan atau mengembangkan paham atau adjaran komunisme Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinja dan penggunaan segala matjam aparatur serta media bagi penjebaran atau pengembangan paham atau adjaran tersebut, dilarang.

Pasal 3 : Khususnja mengenai kegiatan mempeladjarã setjara ilmiah seperti pada Universitas-universitas paham Komunisme/Marxisme, Leninisme dalam rangka mengamalkan Pantjasila, dapat dilakukan setjara dipimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPRGR diharuskan mengadakan peraturan/persyaratan untuk pengamanan.

Pasal 4 : Ketentuan-ketentuan diatas tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik Luar Negeri RI.¹³

Dengan demikian, PKI dengan segala ajarannya dinyatakan terlarang dan merupakan bahaya laten bagi rakyat dan Negara Pancasila la Republik Indonesia.

2. Politik PKI sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945

Banyak tokoh PKI tidak berada di Indonesia sewaktu meletusnya pemberontakan 1926, seperti Muso, Alimin dan sebagainya. Bahkan seorang tokoh yang bernama Tan Malaka yang sejak semula tidak menyetujui pemberontakan tersebut mempunyai kedudukan penting sebagai perwakilan Komunis di Asia Tenggara yang pusat kegiatannya di Manila.

Setelah PKI praktis dihancurkan oleh pemerintah kolonial Belanda Juli 1927, maka kegiatan PKI dilaksanakan oleh tokoh-

¹³ Rasjidi H.M., Islam Menentang Komunisme (Djakarta : Jajasan Islam Studi Club Indonesia, 1966), hal.43

tokohnya secara illegal. Misalnya Tan Malaka bersama dengan Subakat dan Djamaluddin Tamin mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok. Walaupun dalam Partai tersebut tidak disebutkan kata-kata komunis namun sama sekali tidak bisa terlepas dari Marxisme. Menurut Alfian :

"Hal itu tentunya juga berkaitan erat dengan sistim pemikirannya yang mengutamakan kebebasan dan dinamika. Sungguhpun begitu, dia tidak pula mungkin dapat dilepaskan sama sekali dari kaitan pengaruh Marx yang telah mengilhami revolusi Rusia. Sukses Revolusi Bolsyewik itu sangat berkesan padanya, dan oleh karena itu tak mungkin hapus begitu saja".¹⁴

Pengaruh revolusi Bolsyewik dengan berbagai literatur yang dipelajarinya, kemudian pada tahun 1919 ia berhadapan dengan kenyataan tatkala ia bekerja sebagai guru di perkebunan Senembah, Deli, dengan kuli-kuli orang Indonesia yang sangat sengsara, menjadikan ia semakin revolusioner. Pertemuannya dengan Semaun yang tokoh PKI, menyebabkan ia berhasil mengorbit menjadi ketuanya. Tahun 1922 ia terlibat pemogokan buruh, oleh penguasa kolonial ia ditangkap dan dibuang ke luar negeri. Walaupun sebagai tokoh ia banyak bertentangan atau berlawanan pendapat dengan kawan-kawan seperjuangannya misalnya dengan Semaun, Muso bahkan dengan komintern yang ia wakili, bukan berarti tidak komunis. Hal inisemata-mata karena ia lebih kritis dan berpandangan realistis kalau dibandingkan dengan tokoh yang lainnya.

"...Tan Malaka meneruskan sikap bebasnya itu sewaktu ia berkesempatan berbicara dimuka konggres Komintern sebagai wakil PKI, tidak lama sesudah ia dibuang Belanda".¹⁵

Pada masa pendudukan Jepang, Tan Malaka mengadakan hubungan politik dan ideologi dengan Sukarni yang menjadi pimpinan Indonesia Muda dan bekerja di Sendenbu dibawah pimpinan Mr. Muhammad Ya-

¹⁴ Alfian, "Tan Malaka", Prisma 8 (Agustus, 1977), hal.67

¹⁵ Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Jakarta : Gramedia, 1978), hal.163

min. Termasuk dalam group Sukarni ini diantaranya: Adam Malik, Pandu Kartowiguno, Maruto Nitimihardjo. Tan Malaka pada masa pendudukan Jepang menjadi pegawai perusahaan Jepang di Bayah, Banten. Pada masa itu ia juga mengadakan hubungan dengan Mr. Subardjo yang mempunyai group Kaigun. Didalamnya termasuk Mr. Maramis, Dr. Samsi, Dr. Buntaran, Dr. Budhiarto, Dr. Gatot dan lain-lain. Kemudian menggabung juga Sudiro, Wikana, Choiruddin, Djaja Pranata dan Yusuf Hasan.

Muso adalah seorang anggota pimpinan PKI yang berontak tahun 1926, dikirim ke Moskow bersama Alimin dalam rangka mencari bantuan untuk mengadakan pemberontakan tersebut. Akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, dan pada waktu pemberontakan meletus ia tidak berada di Indonesia. Baru pada tahun 1935 ia menyusup ke Surabaya dan berhasil membentuk organisasi bawah tanah yang bernama "PKI Illegal". Organisasi ini didirikan dalam rangka menjalankan kebijaksanaan baru dari komintern yang dikenal dengan nama Doktrin Dimitrov, dalam Sejarah Nasional Indonesia dinyatakan sebagai berikut :

"...Gerakan Komunis Internasional mengirimkan seorang tokoh PKI kembali ke Indonesia. Tokoh itu adalah Muso, yang pada bulan April 1935 mendarat di Surabaya. Dengan bantuan Djoko Sudjono, Pamudji dan Ahmad Sumadisa membentuk organisasi yang diberi nama "PKI-Illegal".

Muso dikirim ke Indonesia untuk menjalankan suatu kebijaksanaan baru dari Gerakan Komunis Internasional yang kemudian dikenal dengan nama Doktrin Dimitrov (Georgi Dimitrov adalah sekretaris Jenderal Komintern tahun 1935-1943). Doktrin Dimitrov ialah, bahwa gerakan Komunis harus bekerja sama dengan kekuatan manapun jua, termasuk kaum imperialis, asal saja menghadapi kaum fasis".¹⁶

PKI Illegal dalam melaksanakan strategi baru tersebut secara tidak resmi bekerja sama dengan organisasi legal. Misal-

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Op.Cit. hal.213

nya anggota/orang PKI illegal menjadi anggota Gerindo dan Parindra. Amir Syarifuddin sebagai salah seorang pendiri dan pemimpin Gerindo, bekerja sama dengan PKI illegal. Ia pernah menyatakan menerima sejumlah uang sewaktu Belanda menyerah kepada Jepang.

"Saya menerima 25 gulden dari Belanda sebelum pendudukan Jepang, buat menjalankan gerakan bawah tanah. Tetapi saya terima uang itu karena Comintern (Communist-International), mengusulkan supaya kita bekerja sama dengan kaum kolonialis".¹⁷

Amir Syarifuddin adalah seorang tokoh komunis yang sejak awal menyembunyikan identitasnya, sehingga berhasil menjalin kerja sama dengan Belanda dalam menghadapi fasisme Jepang. Pada awal pendudukan Jepang ia ikut memperkuat organisasi politik illegal revolusioner Geraf (Gerakan Rakyat Anti Fasis).¹⁸

Dalam pertemuan Geraf yang kedua mengambil kesimpulan bahwa karena pemerintah Belanda telah dilikwidasi, maka rakyat Indonesia harus berdiri sendiri dan bebas melakukan perlawanan anti fasisnya. Diatas reruntuhan fasisme itulah kelak Indonesia Merdeka harus didirikan. Untuk itu Amir Syarifuddin diangkat menjadi Dewan Pimpinan. Karena sikapnya yang demikian, ia ditangkap oleh pemerintah Jepang dan mendapat hukuman mati, tetapi tertolong oleh usaha Bung Karno. Hukumannya diringankan menjadi seumur hidup. Ia sejak tahun 1935 memeluk Agama Kristen, bahkan sebelum mendirikan Gerindo pada tahun 1937, ia akan mendirikan Partai Politik Kristen. Karena perhitungan politik, tidak jadi meneruskan maksudnya.

¹⁷ Abu Hanifah, "Tragedi Amir Syarifuddin", Prisma 8 (Agustus, 1977), hal.97

¹⁸ Sidik Kertopati, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, (Djakarta : Jajasan Pembaruan, 1961), hal.17-18

Pada masa pendudukan Jepang kader-kader PKI bergerak aktif. Wikana yang dikenal pada masa itu dengan nama Raden Sunoto, pada pemberontakan PKI 1948 menjadi pimpinan PKI bidang pemuda dan pada pemberontakan PKI 1965 menjadi anggota pimpinan Komite Sentral. Dengan mendirikan "Indonesia Merdeka" pada masa itu, ia mendatangkan pemuda-pemuda dari daerah untuk diberi pendidikan politik. Wikana biasa membicarakan segala sesuatunya dengan D.N.Aidit, yang pada pemberontakan PKI 1948 menjadi Ketua Pimpinan Urusan Agraria dan pada pemberontakan PKI 1965 sebagai Ketua Biro Politik PKI. D.N.Aidit pada masa pendudukan Jepang, menjadi pimpinan Dewan Politik Gerindom (Gerakan Indonesia Merdeka) bersama Lukman. Dalam Dewan eksekutifnya duduk kader PKI, Sidik Kertopati. Adapun Lukman pada September 1948 menjadi Pimpinan PKI urusan propaganda dan pada pemberontakan PKI 1965 menjadi Wakil Ketua Biro Politik PKI. Dengan demikian sejak pemberontakan PKI 1926 sampai menjelang proklamasi kemerdekaan 1945 PKI tidak mempunyai organisasi yang legal dengan menamakan komunis Indonesia, akan tetapi kader-kadernya sangat militan.

Militansi dari pada kader-kadernya yang menyusup ke berbagai organisasi yang legal membawa PKI kepermukaan dalam Negara Indonesia Merdeka, yaitu pada tanggal 1 September 1948.

"...Mereka berhasil membentuk pimpinan partai. Pimpinan ini terdiri dari 21 anggota yang bertugas menggerakkan PKI berdasarkan program dan teori baru. Tapi ternyata pula mereka tidak sempat melaksanakannya. Tak sampai tiga minggu kemudian sembilan diantaranya mati ketika meletusnya perang saudara waktu itu. Selebihnya kembali untuk sementara ke gerakan bawah tanah, melarikan diri ke luar negeri atau masuk penjara".¹⁹

¹⁹ Jacques Leclerc, Op.Cit. hal.49

3. Politik PKI sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945

Pada detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 PKI belum juga mempunyai organisasi secara efektif, yang merupakan kesatuan program perjuangan. Akan tetapi karena tokoh-tokoh dan kader-kadernya yang militan, mereka mampu bergerak dan menyusup dalam atau dengan organisasi lain. Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 yang berisi anjuran untuk berdirinya partai-partai politik yang bersikap memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia dan menjamin keamanan masyarakat maka timbullah banyak partai termasuk PKI "disamping partai kiri lainnya".

"Pertama kali sejak tahun 1926 saat inilah hal itu bisa dilakukan secara terang-terangan. Satuan-satuan ini berkembang sendiri-sendiri terutama di daerah perkebunan dengan inti-inti yang terdiri dari satuan gerilya yang masih belum teratur".²⁰

Baru pada permulaan tahun 1947 aktivitas PKI mulai tampak menonjol di tangan Sarjono, tetapi kemudian jatuh ketangan Muso. Tokoh Tan Malaka, hingga menjelang proklamasi masih memakai nama samaran Ilyas Husen. Bahkan pada waktu proklamasi ia tidak dapat hadir, akan tetapi beberapa waktu kemudian ia berhasil mempengaruhi Sukarno yang sudah menjabat Presiden. Dengan militansinya yang tinggi, lahirilah semacam surat amanat pelimpahan wewenang kepada Tan Malaka cs. dari Sukarno dan Hatta apabila keduanya berhalangan.

"Sewaktu dia sempat berbicara dengan Sukarno, yang sudah menjadi presiden, Tan Malaka berhasil mengemukakan idenya tentang revolusi, antara lain mengenai bagaimana Revolusi harus dilanjutkan kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mati atau ditangkap) atas diri Sukarno dan Hatta. Diperkirakan pengaruh pembicaraan

²⁰Ibid, hal.54

ini, setelah beberapa waktu mendorong lahirnya semacam surat amanat dari Sukarno dan Hatta, yang antara lain berisi bahwa kalau mereka berdua, karena sesuatu dan lain hal, sampai tidak berdaya memimpin revolusi, maka pimpinan perjuangan kemerdekaan diteruskan oleh Tan Malaka, Iwa Kusumasumantri, Syahrir dan Wongsonegoro".²¹

Pada permulaan tahun 1946 Tan Malaka dapat mempengaruhi 141 organisasi politik, lasykar dan lain sebagainya berhimpun dalam satu wadah "Persatuan Perjuangan" termasuk Masyumi dan PNI. Persatuan Perjuangan dalam kongresnya di Solo mengambil keputusan politik penting dengan "Minimum Program" yang berisi tujuh pasal yang berasal dari pidato Tan Malaka. Minimum program yang sangat mencerminkan visi revolusi Tan Malaka itu adalah sebagai berikut:

- I . Berunding atas pengakuan Kemerdekaan 100%.
- II . Pemerintahan Rakyat (dalam arti : kemauan pemerintah sesuai dengan kemauan rakyat).
- III. Tentara Rakyat (dalam arti : Kemauan Tentara sesuai dengan kemauan rakyat).
- IV . Menyelenggarakan tawanan Eropa.
- V . Melucuti senjata Jepang.
- VI . Menyita hak dan milik musuh.
- VII. Menyita perusahaan (pabrik, bengkel dan lain-lain) dan pertanian (perkebunan, pertambangan dan lain-lain) musuh.²²

Akibat sikap kerasnya itu Tan Malaka pada tanggal 17 Maret 1946 ditangkap dan dipenjarakan, karena oposisinya terhadap pemerintah dan sikapnya yang tidak atau kurang loyal sehingga melemahkan kedudukan pemerintah.

Tokoh Tan Malaka mempunyai perbedaan pandangan dengan tokoh PKI lainnya dalam mengetrapkan Marxisme di Indonesia. Tan Malaka cenderung menjadi Leninnya atau Mao Tse Tungnya Indone-

²¹ Alfian, Op.Cit. hal.174

²² Ibid, hal.178

sia. Pengetrapan Marxisme oleh Tan Malaka disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia. Lain halnya dengan Muso dan Mr. Amir Syarifuddin. Muso yang pada waktu Perang Dunia II berada di Moskow, Mei 1948 kembali berada di Indonesia. Sebagaimana ia pada tahun 1935, sekembalinya dari Moskow itu ia juga membawa strategi baru yang selaras dan sekomando dengan garis Moskow. Garis Moskow yang dibawa oleh Muso itu oleh Onghokham dinamakan "Jalan Baru", sehingga dapat mempersatukan aliran-aliran kiri Indonesia kedalam PKI.²³ Jalan barunya Muso itu karena adanya perubahan strategi baru dari Moskow yang disebut "Two Camp Doctrine" yaitu membagi kekuatan dunia menjadi dua. Kekuatan imperialisme dan kapitalisme dibawah Amerika Serikat cs., sedang kekuatan anti imperialisme dan kapitalisme dibawah Uni Sovyet.²⁴ Muso akan memba-Indonesia yang sedang melawan penjajah Belanda kepada kekuatan kedua yaitu yang dibawah Uni Sovyet.

Tentang kedatangan Muso sesudah Perang Dunia II dari Moskow ke Indonesia ada perbedaan pendapat. Ruslan Abdul Gani menyatakan bahwa kedatangan Muso tersebut pada bulan Agustus 1948.²⁵ Demikian juga Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Muso datang di Yogyakarta tanggal 11 Agustus 1948.²⁶ Sedang Sejarawan Onghokham menyatakan bahwa kedatangan Muso tersebut pada bulan Mei 1948.²⁷ Hal ini diperkuat dengan adanya Rencana Aksi dari PKI-FDR yang dibuat pada bulan Mei 1948 di Yogyakarta, yang isinya sesuai dengan jalan barunya Muso. Dalam hal ini O.O.Trulinger dalam bukunya "Red Bunnens Over Asia", menyatakan bahwa Rencana Aksi terse-

²³Onghokham, "Pemberontakan Madiun 1948", Prisma 7 (Agustus, 1978), hal.68

²⁴Ruslan Abdul Gani, Resapkan dan Amalkan Pantjasila(Jakarta : BP.Prapantja, t.th.), hal.249-250

²⁵Loc.Cit.

²⁶Abu Hanifah, Op.Cit. hal.96

²⁷Onghokham, Op.Cit.hal.67

but berisi 10 pasal sebagai berikut :

1. Harus dibentuk kolonne kelima jang meluas didalam negeri, dengan wakil-wakil dalam sarekat-sarekat buruh, sekolah-sekolah tinggi, kantor-kantor pemerintah, dan organisasi-organisasi kiri jang bersifat politik atau sosial. "Marx Houses" harus diserahi untuk mendidik a-wakil-wakil ini.
2. Bagian Agit-Prop, harus diperluas, dan aktivitetnja harus dipergiat. Dengan djalan menjiarkan buku-buku ketjil dan harian-harian setjara besar-besaran; dengan menggunakan gerakan-gerakan massa dan demonstrasi-demonstrasi; perhatian umum harus ditarik kepada hak-hak rakjat, nasib kaum buruh dipabrik-pabrik, golongan-golongan minoritet, bentuk sosialis dari Sovyet Uni, sistim produksi jang kapitalistis, kaum reaksioner kolonialis, propaganda perang Amerika, dst, dst.
3. Ditempat-tempat jang penting sekali (key position) dalam organisasi-organisasi buruh, harus didudukkan anggota-anggota komunis jang ahli. Demikian djuga dalam organisasi politik dan sosial kiri, sedang propaganda harus djuga ditudjukan supaja timbul pertentangan diantara organisasi-organisasi dari kanan atau organisasi-organisasi anti merah. Lawan-lawan kita harus di tjap sebagai orang-orang reaksioner.
4. Posisi jang menarik perhatian, harus diberikan kepada anggota-anggota partai, agar mereka dapat dipilih menjadi anggota-anggota komite-komite nasional, dengan tjara mengadakan agitasi-agitasi menuntut kenaikan upah, harga-harga murah barang makanan, djaminan sosial. Keadilan kemanusiaan dan perdamaian dunia.
5. Memperdjuangkan susunan parlemen Republik jang kokoh, dengan kerdja sama dengan kaum sosialis, kaum demokrat sosialis dan lain golongan kiri.
6. Memperdjuangkan supaja mendapat kedudukan-kedudukan jang penting sekali dalam djawatan-djawatan negeri dan mendapat kekuasaan penuh atas Pulisi Negara, djawatan badan-badan penjelidik (intelligence servis) dalam politik luar negeri dan sistim moneter.
7. Tuduhan resmi adanja komplotan-komplotan terhadap kedaulatan rakjat, untuk menjingkirkan organisasi-organisasi oposisi dan supaja pemimpin-pemimpin mereka ditangkap oleh anggota-anggota polisi jang berhaluan komunis.
8. Melaksanakan perintah-perintah atau instruksi-instruksi dari Moskow atau dari daerah-daerah jang dikuasai o-

leh Moskow pada saat jang psikologis, sesuai dengan strategi Sovyet Uni. Terlepas dari hal ini, harus ditjiptakan kemungkinan untuk minta intervensi langsung atau bantuan dari Sovyet Uni.

9. Menjiapkan perebutan kekuasaan negara (Coup D'etat), supaja mendapat kekuasaan sepenuhnya atas alat-alat pemerintahan. Harus dibantu dengan aktivitet pemogokan setjara besar-besaran. Djika perlu, memaklumkan perang saudara, dimana tentara Sovyet dapat diminta bantuan untuk melindungi.
10. Serangan jang mendadak dan penguasaan atas perhubungan radio dan pers, Nasionalisasi industri-industri. Deportasi unsur-unsur komunis.²⁸

Muso dengan kemampuan pidatonya dan doktrin komunismenya yang karismatik dapat merebut kepemimpinan organisasi-organisasi kiri di Indonesia dan dapat merebut pimpinan PKI dari tangan Sarjono.²⁹ Kemudian dapat mempersatukan kekuatan Amir Syarifuddin cs. dengan FDR nya dalam kekuatan PKI. Hal ini berarti PKI dapat mempersatukan hampir semua kekuatan kiri di Indonesia dengan terbentuknya pimpinan partai 1 September 1948.

Ketika Mr. Amir Syarifuddin dapat menduduki kursi Perdana Menteri Republik Indonesia setelah St. Syahrir, antara keduanya terjadi perpecahan. Amir Syarifuddin mendirikan PSI baru yang dipimpinnya sendiri. Pada tanggal 26 Pebruari 1948 PSI baru itu diubah menjadi Front Demokrasi Rakyat (FDR).³⁰

Bersatunya Muso dan Amir (Amir Syarifuddin yang telah mengoreksi diri dalam perjalanan dan programnya selama itu), benar-benar merupakan kekuatan PKI yang seutuhnya dengan tercermin dari

²⁸Jusuf Wibisono, "Siasat PKI di Indonesia", Hikmah 9 (Maret, 1958), hal. 16

²⁹Abu Hanifah, Loc.Cit.

³⁰Loc.Cit.

pimpinan partai yang terbentuk pada tanggal 1 September 1948, terdiri dari 21 tokoh pimpinan :

Sekjen Partai	: Muso
Wakil-wakilnya	: Maruto Darusman Tan Ling Djie Ngadiman Hardjosubrata
Urusan Agraria	: Adji Darmo Tjokronegoro D.N. Aidit Sutrisno
Masalah Perburuhan	: Harjono Setiadjud Djoko Sudjono Abdul Madjid Djojodiningrat Ahmad Sumadi
Masalah Militer	: Amir Syarifuddin
Masalah Pemuda	: Wikana
Hubungan Internasional	: Suripno
Hubungan dengan Parlemen	: Njoto
Organisasi	: Sudisman
Propaganda	: Lukman Alimin Sardjono
Bendahara	: Ruskak. ³¹

PKI mulai bermaksud melaksanakan program 10 pasal yang telah direncanakan. Kerusuhan dan pemogokan-pemogokan ditingkatkan disetiap daerah Republik. Oposisinya terhadap kabinet Hatta diperkeras baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang militer. Maka pemberontakan dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Madiun dikuasai dan bendera Merah Putih digantikan dengan bendera Merah/Palu Arit. Pemerintah Indonesia Komunis diproklamakan. Terhadap pemberontakan itu pemerintah dan rakyat dengan tegas dan cepat menumpasnya. "...Karena dukungan Islam Pemerintah mendapat dukungan sebagian masyarakat".³² PKI hanya bertahan beberapa minggu

³¹Jacques Leclerc, Op.Cit. hal.49

³²Onghokham, Loc.Cit.

dan akhirnya kalah. Sedang pemerintah belum tuntas menyelesaikan pemberontakan PK⁺ itu Belanda menyerbu RI Desember 1948.

Pemberontakan PKI tersebut adalah merupakan kudeta PKI terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pada mulanya Presiden Sukarno mengecam dan bertindak tegas terhadap pemberontakan PKI tersebut, akan tetapi dalam pertengahan tahun 1949 pemerintah mengambil sikap yang lunak terhadap PKI. PKI tidak dikutuk, tidak dilarang, tidak dinyatakan sebagai partai/organisasi terlarang dan tokoh-tokohnya banyak yang tidak dituntut atau dihukum.³³

Alimin pengagum Mao Tse Tung, menyusun kembali PKI. Disusunnya kembali SOBSI. Wikana mengubah Pesindo menjadi Pemuda Rakyat. Diterbitkan Surat Kabar PKI, "Bintang Merah" dan "Harian Rakyat". PKI mendapat bantuan sebesar-besarnya dari golongan Cina baik politik maupun materiil. Tahun 1951 D.N. Aidit berhasil menggulingkan Alimin dan menggantikannya sebagai pimpinan PKI bersama Lukman, Njoto, Sudisman dan lain sebagainya. D.N. Aidit, yang pada waktu gagalnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berhasil lari ke Cina kemudian ke Vietnam Utara untuk mendapatkan didikan dari tokoh-tokoh Cina dan Vietnam Utara, kembali ke Jakarta lewat Singapura. PKI dibawah D.N. Aidit memulai dengan memfitnah dan memutar balikkan fakta pemberontakan PKI di Madiun. Untuk menghilangkan cacat dan khianatnya itu dikeluarkan "Buku Putih", yang menyatakan bahwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 adalah "Provokasi Hatta".³⁴

PKI kembali mengetrapkan politik yang memusuhi bangsa dan Negara Republik Indonesia. SOBSI melancarkan pemogokan untuk mengacau jalannya pemerintahan. PKI mengadu domba Dwi Tunggal Sukarno-Hatta. PKI di Tanjung Priuk, Jakarta, memulai dengan menye-

³³Suripto, Op.Cit. hal.15

³⁴Ibid, hal.16

rang Pos Polisi, akibatnya pada bulan Nopember 1952, lebih kurang 15.000 orang PKI ditangkap. Sekali lagi Aidit lolos, akan tetapi kembali bergerak pada masa Kabinet Wilopo. Ia berhasil membentuk "Front Nasional" yang memberi kesempatan bergeraknya massa aksi komunis. Ia berhasil mempengaruhi Presiden Sukarno. Sewaktu Presiden melawat ke Amerika Serikat, D.N. Aidit berhasil mendampingi, yang menyebabkan hampir saja tidak diterimanya kunjungan tersebut oleh Presiden Amerika Serikat, Eisonhower. Condongnya Presiden Sukarno terhadap komunis, dengan nasakomnya, dibuat oleh PKI sebagai kesempatan untuk memukul lawan-lawan politiknya. Masyumi, PSI dan Partai Murba berhasil dibubarkan Presiden Sukarno. PKI berhasil mengadakan infiltrasi kedalam tubuh ABRI dan mengacau perekonomian bangsa.

PKI jelas akan mengadakan pemberontakan/kudeta lagi terhadap pemerintah Republik Indonesia, pada waktu diketahui program jangka panjangnya, yang akan menciptakan Negara Indonesia berdasar Manifesto Komunis. PKI menganggap bahwa Pancasila hanya sebagai alat pemersatu. Dokumen yang berisi Program Jangka Panjang PKI meliputi :

- Tujuan dan Dasar Partai : Mendirikan suatu negara yang 100% proletar dimana kaum buruh, tani dan golongan-golongan lainnya berkuasa penuh, dimana kapitalis dan imperialis digentjet dan dimusnahkan. Dasar negara adalah Manifesto Komunis seperti yang ditjita-tjitakan oleh Karl Marx, Engels, Lenin dan Mao Tse Tung.
- Pelaksanaan dalam menudju kemenangan : Segala djalan baik atau buruk harus ditempuh untuk memenangkan tjita-tjita partai. Tiap rintangan yang menghambat atau mentjoba menghalangi partai dalam mengedjar tudjuan haruslah dilenjakkan, sekali lagi dilenjakkan. Karena tiada mungkin golongan kita dapat berkompromi dengan golongan lain yang dasarnya bukan berpedoman kepada Manifesto Komunis.
- Musuh-musuh partai :
 1. Golongan Agama
 2. Kapitalis dan imperialis
 3. Kaum nasionalis
 4. Organisasi-organisasi yang bukan bernaung dibawah partai.

- Langkah-langkah menuju kemenangan : Partai menentukan langkah-langkah mana yang harus diambil dalam menuju kemenangan. Di negara Indonesia dimana sebagian besar penduduknya masih terbelakang dalam soal pengetahuan³⁵ sangatlah mudah untuk menjuburkan tumbuhnya partai.

Setelah mengalami puncak kondisi dan situasi, tanggal 30 September 1965 PKI mengadakan kudeta kembali terhadap Pemerintah Republik, Indonesia, yang dimulai dengan pembunuhan terhadap pimpinan ABRI. ABRI dianggap musuh yang terkuat (terutama Angkatan Darat) dan sebagai penghalang utama rencana PKI. Disamping itu PKI dendam kepada ABRI sejak penumpasan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Akibat kudeta PKI tersebut banyak korban baik dari rakyat, tokoh masyarakat maupun tokoh Agama.

Rakyat dan bangsa Indonesia menumpasnya. Kudeta PKI tersebut mengalami kegagalan yang sekaligus merupakan akhir riwayat PKI dan ajarannya di Indonesia. Dengan ini bukan berarti bahaya PKI sudah mati, akan tetapi masih merupakan "bahaya laten" bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya usaha-usaha untuk menghidupkan kembali PKI dan Bergeraknya kader-kader PKI di Blitar selatan dan di beberapa daerah pada akhir dasawarsa 60-an, yang dengan cepat bisa ditumpas oleh rakyat dan pemerintah Republik Indonesia.

B. Faktor terjadinya pemberontakan PKI di Madiun

Ideologi Komunis menetapkan pokok-pokok doktrin yang harus diperjuangkan dengan berbagai cara demi untuk kemenangan tujuannya. Pokok-pokok ideologi komunis itu pada dasarnya dapat dikemukakan :

- "1. Tidak mempercayai Tuhan...2. Tidak mempercayai pikiran orang lain... 3. Penyanggahan terhadap persamaan manusia ... 4. Etika tingkah laku didasarkan atas kekerasan...

³⁵ Suropto, Op.Cit. hal.26-27

5. Imperialisme... 6. Interpretasi secara ekonomi terhadap sejarah... 7. Sistem ekonomi yang disentralisasi... 8. Manajemen yang diktatoris... 9. Pemerintahan oleh yang sedikit... 10. Tidak mengakui pernyataan hak-hak azasi manusia... 11. Penentangan terhadap hukum dan ketertiban internasional".³⁶

Bagi komunisme di Indonesia untuk merealisasikan program ideologinya, pada bulan Mei 1948 dirumuskan Rencana Aksi yang terdiri 10 pasal untuk merebut kekuasaan di Indonesia.³⁷ Suasana kritis negara Republik Indonesia pada tahun 1948 saat seluruh bangsa Indonesia dihadapkan kepada perjuangan (baik fisik maupun diplomasi) menghadapi penjajah Belanda dipakai oleh PKI untuk melaksanakan tujuan politiknya. Suasana bangsa dan Negara Republik Indonesia yang demikian ditunjang pula dengan gerakan komunis internasional yang digerakkan Sovyet Rusia, merupakan faktor yang mendorong PKI lebih cepat memberontak untuk merebut kekuasaan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia. Maka pada tanggal 18 September 1948, di Madiun, oleh tokoh PKI diproklamkan berdirinya Republik Sovyet Indonesia.³⁸ Yang sangat memungkinkan PKI menggunakan kesempatan untuk kemenangan perjuangan politik ideologinya dengan mendirikan Negara Komunis Indonesia itu adalah keadaan politik, militer, sosial dan ekonomi Negara Republik Indonesia yang baru beberapa tahun merdeka, yang menghadapi tekanan-tekanan penjajah Belanda.

1. Keadaan politik

Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia berturut-turut pemerintahan dilaksanakan dengan sistem Kabinet Presidensiil di bawah Presiden Sukarno kemudian untuk "mengambil hati sekutu" di-

³⁶ Sukarna, Ideologi (Bandung : Penerbit Alumni, 1981), hal.45-57

³⁷ Jusuf Wibisono, Loc.Cit.

³⁸ Sartono Kartodirdjo dkk. Op.Cit. hal.58

ganti dengan sistim Kabinet Parleментар dibawah Perdana Menteri St.Syahrir, yang setelah jatuh, dipegang oleh Mr.Amir Syarifuddin. Keduanya adalah dari pimpinan Partai Sosialis, yang dianggap tidak pernah bekerja sama dengan Pemerintah Pendudukan Jepang.

Dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin yang bersumber pada persetujuan Renville, kemudian Presiden membentuk Kabinet Presidensiil lagi dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. "Disinilah awal krisis Negara Republik Indonesia"³⁹.

Perjanjian Renville yang ditanda tangani Perdana Menteri Amir Syarifuddin ditentang oleh Partai Besar Masyumi dan PNI, karena sangat memberikan konsesi kepada pihak Belanda dan sangat merugikan Republik Indonesia. Pada mulanya Partai Sosialis (Amir Syarifuddin) masih diajak untuk masuk dalam Kabinet Hatta, bersama Masyumi dan PNI. Dengan maksud baik Hatta, untuk menciptakan suatu Kabinet Nasional yang didukung oleh kekuatan semua partai besar, yang oleh Hatta ditawarkan kepada Amir Syarifuddin tiga kursi kabinet tanpa portofolio.

Akan tetapi Amir terlalu banyak menuntut untuk duduk dalam kursi kabinet. Tuntutan Amir Syarifuddin itu tidak diterima oleh partai-partai lainnya, seperti dalam buku Akademi Militer Yogya dinyatakan :

"...Amir terlalu banyak menuntut kursi (10 kursi, diantaranya Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri) suatu tuntutan yang tak mungkin bisa diterima oleh partai lain sehingga akhirnya Hatta terpaksa meninggalkan Amir, membentuk Kabinet Masyumi-PNI tanpa Partai Sosialis".⁴⁰

Sejak itu Partai Sosialis menjadi partai oposisi di Negara Republik Indonesia. Akan tetapi sejak itu pula keretakan Partai

³⁹Moehkardi, Akademi Militer Yogya Dalam Perjuangan Politik 1945-1949 (Jakarta : PT Inaltu, 1977), hal.83

⁴⁰Ibid, hal.84

Sosialis St.Syahrir dengan Amir Syarifuddin sejak Maret 1947 benar-benar pecah sama sekali. St.Syahrir yang mendukung Hatta pada tanggal 12 Pebruari 1948 memisahkan diri dan mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sedang Mr.Amir Syarifuddin menggagalkan kekuatan oposisinya dari kelompok kiri yang komunistis seperti SOBSI, Pesindo, BTI, Lasykar Rakyat, PKI dan Partainya sendiri dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 5 Mei 1948.⁴¹ Dengan demikian Amir mengubah sikap oposisinya dari oposisi parlementer menjadi aksi massa.

Kabinet Hatta melaksanakan programnya yang meliputi: menyelenggarakan Persetujuan Renville, mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS), melaksanakan Rasionalisasi dan Rekonstruksi aparat negara, dan pembangunan.⁴² FDR menjadi oposan keras terhadap kabinet Hatta dan menimbulkan permusuhan-permusuhan terhadap lawan politiknya, sehingga :

"...Kegiatan politik FDR dibarengi dengan usaha-usaha untuk memancing-mancing bentrokan dengan golongan lawan politiknya. Pada tanggal 15 Juli 1948 kaum yang berada dibawah pengaruh FDR mengadakan pemogokan di pabrik karung Delanggu (Klaten). Lima hari kemudian terjadi bentrokan antara sekelompok pemogok dengan Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) organisasi tani Masyumi, yang menentang mogok".⁴³

Lebih-lebih setelah lawan-lawan Amir Syarifuddin yang ditahan sewaktu ia memerintah dibebaskan oleh Pemerintah Hatta, yang kemudian membentuk Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) dengan maksud mengimbangi FDR. Bersama dengan itu, datang tokoh kawakan komunis Indonesia yang tinggal lama di Rusia, ialah Muso. Ia terkenal sebagai tokoh Stalinis keras dengan membawa "jalan baru" yang taktik strateginya disesuaikan dengan "Two Camp Doctrine" nya Zada-

⁴¹Nasution A.H., Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Bandung : Angkasa, 1978), hal.13

⁴²Mochkardi, Op.Cit. hal.83

⁴³Sartono Kartodirdjo dkk., Op.Cit. hal.56

nov. Muso menghendaki Indonesia yang sedang melawan penjajah Belanda bergabung dengan kekuatan anti imperialis dibawah Soviet Rusia. Muso berhasil mengkoreksi dan membawa kekuatan komunis Indonesia melebur menjadi satu kekuatan kedalam PKI. Dalam Sejarah Nasional Indonesia dinyatakan : "Partai yang berhaluan komunis yakni Partai Sosialis, Partai Buruh pada bulan Agustus 1948 berfusi dengan PKI".⁴⁴

Juga dinyatakan dalam buku Akademi Militer Yogya :

"Konsep politik dan tak-tik perjuangan baru yang dibawa oleh Muso segera diterima oleh PKI/FDR, yaitu peleburan Partai Sosialis, Partai Buruh dan PKI menjadi satu partai yaitu PKI, demi untuk memperkuat organisasi."⁴⁵

Kombinasi Muso-Amir dengan orang-orang komunis yang semakin terkonsolidasi dan nyata kekuatannya semakin meningkatkan kekerasan oposisinya, dimulai dengan melancarkan kecaman dan agitasi politik terhadap Kabinet Hatta dan lawan-lawannya melalui mass media dan rapat-rapat raksasa. Kemudian diikuti dengan berbagai demonstrasi dan ditingkatkan pula dengan pemogokan-pemogokan kaum buruh misalnya pemogokan buruh minyak Cepu, pemogokan pegawai kota praja Madiun dan sebagainya.

Dengan melihat kepada tak-tik Muso, Amir Syarifuddin menginsyafi kesalahan-kesalahan jalan yang ditempuh selama itu, dikatakannya :

"Saya mengakui kesalahan-kesalahan dimasa lalu itu...saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan dimasa datang".⁴⁶

Amir Syarifuddin menuntut dibubarkannya perjanjian Renville, pada hal perjanjian Renville itu yang membuat adalah Amir Syarifuddin sendiri yang saat menanda tangannya ia sebagai Perdana

⁴⁴ Ibid, hal.57

⁴⁵ Moehkardi, Op.Cit. hal.84

⁴⁶ Nasution A.H., Op.Cit. hal.134

Menteri. Bahkan Masyumi dan PNI yang ikut dalam Kabinet Amir Syarifuddin tidak menyetujui.

"...Zainal Arifin (Masyumi) menyatakan, bahwa meskipun PNI dan Masyumi ikut serta dalam Kabinet yang lalu, tetapi pada saat Renville ditanda tangani kedua partai tersebut tak dapat menyetujui dan menunjukkan sikap menolak, dan bahwa yang bertanggung jawab adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin..."⁴⁷

Maka dengan demikian terdapat suatu kontradiksi, seperti dikatakan oleh Nyoman Dekker sebagai berikut :

"...Terdapatlah suatu kontradiksi yang sangat menarik, yaitu : dulu Renville pada dasarnya tidak disetujui oleh Bung Hatta, tetapi kini dialah yang harus melaksanakan isi persetujuan itu demi nama kehormatan Republik Indonesia, sedangkan perjanjian Renville yang dibuat oleh Amir, kemudian dia sendirilah yang menentang persetujuan yang dibuatnya itu".⁴⁸

Muso mengecam kebijaksanaan dan strategi Pemerintah Republik Indonesia, yang dianggapnya bersifat defensip, oleh karena itu akan gagal. Dalam pada itu Muso mengusulkan agar dibentuk Front Nasional. Akan tetapi oleh Abu Hanifah (Masyumi) usul Muso itu dianggap sebagai balon politik. "Saya berpendapat bahwa usul PKI itu hanya balon politik dan tidak perlu dianggap serius".⁴⁹ Pernyataan Abu Hanifah itu ternyata benar sebab dalam wawancara pers, Muso mengatakan :

"...bahwa didalam tahap perjuangan demokrasi baru, masih digunakan segenap aliran, tetapi pada suatu waktu mereka harus disingkirkan karena hanya orang-orang PKI yang dapat menyelesaikan revolusi".⁵⁰

⁴⁷Ibid, hal.107

⁴⁸Nyoman Dekker, Sejarah Revolusi Nasional (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1980), hal.65

⁴⁹Abu Hanifah, Op.Cit. hal.98

⁵⁰Sartono Kartodirdjo dkk., Op.Cit. hal.57

Pecahnya kekuatan nasional yang sengaja dibuat oleh Muso-Amir yang tidak mungkin akan dapat bertemu itu dibarengi pula dengan kegiatan-kegiatan didaerah lain di Indonesia yang diduduki oleh Belanda, lebih mendorong Muso-Amir untuk melaksanakan pemberontakannya.

Serangan-serangan didaerah pendudukan Belanda adalah oleh gerilyawan-gerilyawan Republik Indonesia atau oleh rakyat setempat yang pro RI, untuk mengacau kedudukan Belanda. Misalnya di Jakarta oleh GPRI-nya Budhiardjo, di Brebes oleh Hizbullah, di Tasik-Garut oleh Hizbullah, sabotase kereta api Jakarta-Cirebon dan Jakarta-Bandung dan lain sebagainya. Hal ini dibuat alasan oleh Belanda untuk mengadakan serangan balasan. Maka pada tanggal 8 September 1948, Jenderal Baay Panglima Pertahanan di Jawa Timur, menyampaikan ultimatum kepada Pemerintah Republik Indonesia. Ultimatum Jenderal Baay itu sebagai berikut:

- "1. Karena seringnya gerombolan yang berasal dari sebelah Republik dari garis status quo beroperasi didaerah Belanda, yang antara lain telah menyebabkan meninggalnya Sersan Mayor Bruin, Mayor Pullen diminta memberikan perantaraannya untuk mendesak kepada pembesar-pembesar Republik agar menyuruh menghentikan gerakan jahat itu dalam waktu 48 jam.
2. Jika pembesar-pembesar Republik tidak memenuhi permintaan ini dalam waktu 48 jam, maka saya akan minta kepada Komandan Tentara supaya saya diberi izin mengambil tindakan untuk menumpas perbuatan permusuhan demikian".⁵¹

Kemudian ternyata ultimatum itu dibuktikan dengan serangan Belanda terhadap Republik Indonesia pada bulan Desember 1948.

Oleh kekuatan PKI, ultimatum tersebut, dipakai alasan untuk memperkuat garis depan, batalyon-batalyon yang pro PKI mengadakan pemusatan-pemusatan kekuatan didaerah Madiun. Ternyata

⁵¹Nasution, Op.Cit. hal. 179

mereka tidak bergerak kejurusan garis depan, akan tetapi hanya beberapa waktu kemudian mereka merupakan kekuatan PKI yang dipusatkan di Madiun untuk memberontak kepada Pemerintah Republik Indonesia.

2. Keadaan militer

Basis oposisi Amir Syarifuddin tidak hanya pada kekuatan politik sipil/FDR-nya saja, akan tetapi ia juga mempunyai basis dalam kalangan militer. Amir Syarifuddin selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, sejak Oktober 1946, kemudian jabatan itu tetap ia rangkap tatkala menjadi Perdana Menteri, Juli 1947 sampai Januari 1948, memberikan kesempatan untuk membina pengaruhnya dalam Angkatan Bersenjata. Dalam masa jabatan itu ia berusaha mengetrapkan sistim komisaris politik pada Tentara Merah Rusia dengan membentuk Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), Biro Perjuangan, TNI Masyarakat dan lain-lain.⁵²

Bahkan Amir Syarifuddin memperhitungkan dengan pasti bahwa 35% Tentara Republik Indonesia dalam kekuasaan/pengaruhnya yang merupakan kader-kader Amir Syarifuddin sendiri.⁵³ Sedang persenjataanannya lebih kuat, sebab usaha-usahanya waktu ia menjabat Menteri Pertahanan itu. Dikatakan oleh Onghokham bahwa :

"...Kabinet Amir menyalurkan sebagian besar anggaran belanja pertahanan pada apa yang disebut TNI masyarakat (Pesindo dan organisasi para-militer lainnya dari partai dan masyarakat)".⁵⁴

Kabinet Hatta yang didukung oleh Masyumi, PNI, PSI dan BPRI tetap melaksanakan programnya. Tatkala melaksanakan program "RARE" (Rasionalisasi dan Rekonstruksi) Angkatan Perang, menda-

⁵² Nugroho Notosusanto, "Angkatan Bersenjata Dalam Percaturan Politik di Indonesia", Prisma 8 (Agustus, 1979), hal.22

⁵³ Sayuti Melik, Op.Cit. hal.7

⁵⁴ Onghokham, Op.Cit. hal.65

patkan tantangan dari oposisi Amir-Muso. Sebab dari aspek politik RARE Angkatan Perang memotong pengaruh komunis dalam Angkatan Perang yang sejak lama dibina. Disamping itu tujuan RARE tersebut oleh Hatta dimaksudkan juga untuk menyalurkan tenaga Angkatan Perang yang mencapai 453.000 orang ke sektor yang lebih produktif, sehingga dapat menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan Negara. RARE itu dilaksanakan oleh Hatta dengan kebijaksanaan mungkin yaitu :

1. Melepaskan mereka yang suka rela mau meninggalkan tentara, diantaranya ada yang ingin kembali kepada pekerjaannya yang lama sebagai guru, sebagai partikelir dan lain-lain.
2. Menyerahkan mereka kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda yang menyiapkan obyek-obyek usaha bagi mereka.
3. Mengembalikan seratus ribu orang kembali kedalam masyarakat desa".⁵⁵

Dalam kepangkatan ketentaraan ditempuh kebijaksanaan dengan menurunkan satu tingkat untuk menyeimbangkan antara pangkat dan jabatan. Sejumlah perwira diangkat sebagai perwira cadangan. Jumlah Divisi TNI disederhanakan dengan menjadikan satu sivisi dari beberapa divisi. Pada akhirnya pembubaran TNI masyarakat yang berasal dari lasykar-lasykar yang diorganisir oleh Amir Syarifuddin dalam Biro Perjuangan semasa ia menjabat Menteri Pertahanan.⁵⁶ RARE Hatta tersebut digunakan sebagai peluang bagi FDR/PKI sebagai issue untuk memperluas pengaruhnya, terutama yang terkena RARE. Dikatakan oleh mereka yang menentang RARE bahwa mereka yang menjadi tentara tanpa pengalaman militer dan pendidikan akan digantikan oleh mereka yang berpengalaman militer dan berpendidikan. Hal ini berarti RARE Hatta akan banyak merugikan Ko-

⁵⁵Nasution A.H., Op.Cit. hal.92

⁵⁶Mochkardi, Op.Cit. hal.87

mandan Perwira di Jawa Timur (Madiun dan Kediri) dan Jawa Tengah (Solo).⁵⁷

Maka timbullah perlawanan, terutama dari TNI masyarakat yang didominasi oleh Pesindo. Pemerintah, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemudian mengadakan pembersihan misalnya di Solo, Kediri dan Blitar. Pesindo di Madiun, yang sejak semula kuat pengaruhnya didaerah itu, bersama kekuatan sayap kiri lainnya, mengorganisir perlawanan dengan mengadakan pemogokan, seperti pemogokan para pekerja pamong praja dan pemogokan buruh kereta api. Dalam menghadapi tindakan pembersihan dari TNI tersebut, Pesindo di Madiun memperkuat diri dengan mengkonsentrasikan kekuatan-kekuatannya yang berada diluar Madiun. Dengan demikian Madiun menjadi pusat Pesindo dan kekuatan-kekuatan kiri lainnya. Maka Pesindo dihadapkan kepada dua alternatif :

"...Menunggu pasukan pemerintah dan dilucuti senjatanya atau bertindak dan mengambil alih kekuasaan di Madiun berarti menetralsir TNI setempat. Akhirnya jalan kedua ini yang dipilih oleh pesindo".⁵⁸

Sebagai realisasi perjanjian Renville, maka pasukan Siliwangi harus dihijsrahkandari Jawa Barat. Sebagian mereka ditempatkan di Solo. Maka keadaanpun semakin eksklusip (gawat dan tak terkendali), lebih-lebih setelah usaha mempengaruhi pasukan Siliwangi, Amir Syarifuddin gagal. Terjadilah insiden di Solo, antara kekuatan-kekuatan FDR/PKI dengan lawan-lawannya yang kemudian mengawali pemberontakannya yang dicetuskan di Madiun.

3. Keadaan Sosial ekonomi

Keadaan sosial-ekonomi bangsa Indonesia pada tahun 1948 tidak banyak berubah sejak kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tekanan-tekanan Belanda menyebabkan

⁵⁷Onghokham, Op.Cit. hal.64

⁵⁸Ibid, hal.69

pemerintah menekankan pada kemenangan politik dan militer yang juga belum mempunyai pemerintah yang kuat untuk melaksanakan program-programnya. Hal ini disebabkan karena jatuh banggunya kabinet yang tidak dapat melaksanakan program secara kontinyu. Hingga yang menyebabkan kondisi sosial-ekonomi pada waktu itu tidak banyak berubah dari tatkala zaman Belanda dan Jepang, misalnya masalah

"...kekuzangan tanah, kekurangan lapangan kerja, perbedaan sosial, eksploitasi, pajak tinggi yang tidak disukai, upah buruh yang rendah, dan seterusnya".⁵⁹

Ketidak puasan rakyat diasosiasikan kepada aparat negara yang memerintah, Jepang, Belanda yang mau kembali, dan penguasa-penguasa negara lainnya, pamong praja, polisi, kekuasaan raja yang masih ada dan lain-lain yang dialami dalam bentuk penindasan.⁶⁰ Masalah tersebut yang belum banyak diperhatikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang sering dibiarkan dalam keadaan status quo. Alasan pemerintah adalah belum mempunyai cukup tenaga ahli untuk memenuhi semua jabatan birokrasi.⁶¹

Akibat agresi Belanda yang pertama pada tahun 1947 yang kemudian diikuti oleh Perjanjian Renville, bertambah sempit daerah kekuasaan Republik Indonesia. Republik Indonesia tidak mempunyai pelabuhan kecuali di pantai selatan, yang tidak banyak berfungsi. Daerah kekuasaan RI sebagian besar daerah minus. Dengan demikian Republik Indonesia kehilangan banyak daerah yang subur, sehingga situasi pangan menjadi sulit. Realisasi perjanjian Renville lebih menambah beban berat sosial-ekonomi RI, misalnya hijrahnya Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, me-

⁵⁹ Onghokham, Op.Cit. hal.61

⁶⁰ Loc.Cit.

⁶¹ Ibid, hal.62

ngalirnya pengungsi dari daerah pendudukan Belanda dan ditambah pula dengan blokade Belanda terhadap RI. Dikatakan oleh G. Mc.Turnan Kahin bahwa Belanda semakin ketat melakukan blokade sehingga hubungan dengan luar terputus. Keadaan semakin bertambah sulit dengan mengalirnya hampir satu juta pengungsi dari daerah pendudukan Belanda.⁶² Yang demikian itu berakibat kedalam, yang oleh Onghokham dikatakan bahwa inflasi membubung dan korupsi meluas.⁶³ Keadaan sosial-ekonomi pemerintah RI yang demikian parah dimanfaatkan oleh FDR/PKI menjadi obyek kecaman dan merupakan tanah subur bagi propaganda komunis.

Usaha-usaha Kabinet Hatta sebagaimana tercermin dalam empat programnya mendapat hambatan. Untuk mengatasi keadaan sosial-ekonomi tersebut Hatta merealisasikan program rasionalisasi dan rekonstruksi (RARE). Dalam bidang pembangunan Hatta melaksanakan hasil Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dibentuk pada bulan April 1947, dengan Dasar Pokok dari Rancangan Ekonomi Indonesia :

- a. Mengintensifkan usaha produksi
- b. Memajukan pertukaran internasional
- c. Mencapai taraf hidup yang lebih tinggi
- d. Mempertinggi derajat dan kecakapan rakyat".⁶⁴

Pemanfaatan oleh Muso terhadap masalah sosial-ekonomi Republik Indonesia digunakan sebagai alasan untuk mengecam pemerintah berturut-turut misalnya : pada tanggal 16 Agustus 1948 ia menulis :

"...Lain kelemahan Republik kita ialah bahwa ia masih terus mempertahankan aparat pemerintahan kolonial, sedang menurut petunjuknya Karl Marx, aparat itu sesudahnya revolusi menang, ia harus dihancurkan dan diganti dengan yang baru, terdiri dari anasir-anasir yang ke-rakytan. Oleh karena itu bahaya besarlah, bahwa kekua-

⁶² Kahin G.Mc.T., Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University Press, 1970), hal.251

⁶³ Onghokham, Op.Cit. hal.64

⁶⁴ Nasution A.H., Op.Cit. hal.224

saan negara mungkin akan memusuhi rakyat dan bukannya bekerja untuk rakyat. Kesalahan ini dalam beberapa hal juga terdapat dalam tentara.

...Hal yang bukan sedikit mengeruhkan suasana didalam negeri pada waktu-waktu yang akhir ini juga hal keuangan yang dimana-mana dengan terang telah mengadakan kesukaran-kesukaran. Uang kecil tak ada. Bahaya inflasi mengancam. Inflasi berarti pukulan terhadap penghidupan rakyat jelata".⁶⁵

Pada tanggal 5 September 1948 ia juga menulis :

- "a. Aparat pemerintah yang tua, aparat kolonial, harus dihancurkan (Zerbrechen, K. Marx). Ia harus diganti dengan baru, yang tersusun dari elemen-elemen buruh. Inilah jaminan bahwa aturan-aturan demokratis akan dilakukan dengan konsekwen.
- b. Hak-hak demokratis diberikan pada kaum buruh. Mereka harus mengemudikan dan mengontrol produksi. Semua langkah harus dilakukan supaya memperbaiki keadaan kaum buruh semuanya dengan radikal.
- c. Kaum tani harus diberi tanah, apalagi mereka yang tak mempunyainya. Semboyan revolusi ialah : "Tanah untuk mereka yang mengerjakan". Dengan singkat, revolusi agraria harus dilakukan dengan konsekwen.
- d. Produksi negeri harus diperbaiki lekas, dibawah pengawasan langsung dari pemerintah. Pun distribusi harus diatur baik supaya menyenangkan rakyat umum dan bukannya untuk segolongan kecil dari penduduk.
- e. Sistim keuangan harus diatur supaya memenuhi keperluan rakyat jelata, jangan sampai merugikan rakyat. Juga diatur begitu macam sehingga spekulasi dan kaum catut tidak dapat kesempatan untuk membikin kaya diri sendiri.
- f. Kanak-kanak diharuskan bersekolah atas tanggungan pemerintah, buta huruf diberantas selekas mungkin dengan mengingat bahwa dengan orang-orang yang buta huruf orang tak dapat menyusun dunia baru yang demokratis".⁶⁶

Dengan demikian Muso selalu mengadakan oposisi dan agitasi de-

⁶⁵Nasution A.H., Op.Cit. hal.216

⁶⁶Ibid, hal.215

ngan mengecam pemerintah Republik Indonesia. Dalam berbagai kesempatan ia menempatkan dirinya sebagai pembela dan kampiun rakyat jelata, dalam kerangka menarik dukungan massa untuk mencapai ambisi dan rencananya memberontak terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

Adapun Madiun dijadikan pusat pemberontakan adalah karena perhitungan yang memungkinkan mencapai kemenangan dari segi-segi keadaan politik, militer, sosial dan ekonomi pada waktu itu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Onghokham,

"Sejak dahulu daerah Madiun merupakan daerah pembuangan pangeran-pangeran yang tidak setia kepada raja dan pemberontak-pemberontak lain. Pada waktu revolusi sesudah Renville kota Madiun yang berpenduduk 2.00.000 merupakan kota ketiga dari Republik. Letaknya sangat strategis karena berada dipersimpangan jalan kereta api. Sejak pejahnya revolusi kehidupan politik di Karesidenan Madiun ini dikuasai oleh sayap kiri yang terdiri dari Sarekat Rakyat (SR), generasi tua dan Pesindo. Golongan kiri memimpin reaksi masyarakat terhadap pamong praja dan priyayi yang terlalu erat hubungannya dengan Jepang. Dalam tahun 1946 umpamanya PS berhasil memperbaharui kontrak-kontrak perkebunan dengan para petani yang menguntungkan yang terakhir. Didaerah Madiun yang agak minus ini dalam produksi beras, berkembanglah tekanan keras dari petani-petani tanpa tanah dan pihak lain untuk merubah berbagai perkebunan menjadi tanah sawah. Juga ini dipimpin oleh golongan kiri. Pada tahun 1948 sokongan terhadap FDR/PKI datang dari petani-petani disekitar perkebunan, buruh-buruh perkebunan dan pabrik-pabrik gula, buruh-buruh kereta api dan Sarekat Pegawai (buruh) di Pamong praja. Selain itu secara samar-samar datang dukungan bagi golongan kiri dari penduduk abangan di karesidenan ini".⁶⁷

H. Akhsani, (1948) sebagai santri yang aktif, dan sekarang (1981) sebagai Ketua MUI Kabupaten Madiun, menyatakan :

"...bahwa dipilihnya Madiun sebagai pusat pemberontakan bukanlah sebagai ketepatan saja, akan tetapi karena Ma-

⁶⁷ Onghokham, Op.Cit. hal.68

diun mempunyai aspek-aspek yang menguntungkan untuk menang. Madiun merupakan imbingan yang strategis bagi Yogyakarta (Ibukota RI), yang di Yogya sendiri terletak kekuatan tentara Republik Indonesia. Sedang di Madiun banyak kader-kader komunis dari buruh, seperti buruh bingkil kereta api, buruh Pabrik Gula Glodok, Pabrik Gula Pagotan, Pabrik Gula Kanigoro, Pabrik Gula Gorang-Gareng, Pabrik Gula Rejo Agung dan Pabrik Gula Geneng".⁶⁸

Menurut Mohammad bin H.Thoha, yang pada tahun 1948 sebagai Pembina Hizbullah Karesidenan Madiun dan sekarang (1981) sebagai Anggota DPRD Tk.II Kabupaten Madiun mengatakan :

"Bahwa Madiun merupakan kota buruh sejak zaman Belanda dan pengaruh komunis sangat besar. Disamping itu pemerintah RI pada waktu itu masih mempunyai hubungan baik dengan Jakarta dan Surabaya (yang kedua-duanya dalam pendudukan Belanda). Juga menggunakan teori "dihantam ekornya maka kepalanya akan tunduk", maka Madiun dikuasai terlebih dahulu, Yogyakarta dan Solo akan lebih mudah untuk dikuasai kemudian".⁶⁹

Kemenangan-kemenangan di Eropa Timur setelah Perang Dunia II berpengaruh dan mendorong PKI untuk memberontak. Bahkan pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun adalah segaris dengan politik komunis internasional yang digerakkan oleh Sovyet Rusia. Garis Zhadanov dengan "Two Camp Doctrine"-nya yang menentang Rencana Marshall dibawa oleh Muso ke Indonesia. Kemudian dikenal dengan "Jalan Baru" bagi kekuatan komunis di Indonesia yang merupakan semacam instruksi untuk memenangkan komunisme. Yang demikian itu tidak saja terjadi di Indonesia, akan tetapi juga terjadi pada negara-negara tetangga (Asia Tenggara). Hal ini dimulai dengan konperensi komunis internasional di Calcutta pada bulan Pebruari 1948 yang merencanakan pemberontakan komunis di Asia Tenggara. Setelah konperensi, berturut-turut meletus pem-

⁶⁸Wawancara dengan H.Akhsani, 29 Juni 1981, di Madiun

⁶⁹Wawancara dengan Muhammad bun H.Thoha, 10 Juli 1981, di Madiun

berontakan komunis di Birma (Mei 1948), di Malaya (Juni 1948), dan di Indonesia (18 September 1948). Pergolakan komunis juga terjadi di Singapura pada bulan Agustus 1948, begitu juga di Siam terjadi pada awal September 1948.⁷⁰

Sebagaimana menurut Nasution yang diutarakan kepada Presiden Sukarno pada tanggal 18 September 1948 di Yogyakarta. Dikatakan bahwa rencana komunis Indonesia adalah serentak dengan peristiwa-peristiwa pertumpahan darah di Tiongkok, Birma dan Malaya karena komunis bernaung dibawah satu organisasi internasional dengan pimpinan siasat yang internasional pula. Begitu pula "Sin Po" surat kabar komunis menyatakan bahwa pemberontakan Madiun setelah datangnya Suripno dan Muso yang semua itu menurut Time Table Kominform.⁷¹

Menjelang meletusnya pemberontakan PKI di Madiun 1948, pada tanggal 8 Juli 1948 Muso berpidato pada rapat raksasa PKI di Madiun antara lain berkata :

"Rusia adalah pimpinan revolusi dunia dan revolusi Indonesia adalah bagian dari revolusi dunia; Jadi Indonesia berada dibawah Sovyet. Kalau dipihak Rusia kita adalah benar".⁷²

Dengan demikian Muso menghendaki Indonesia menjadi satelit Sovyet Rusia, sebagaimana negara-negara Eropa Timur yang setelah Perang Dunia II berhasil diletakkan dibawah pengaruh dan berada dalam hegemoni Sovyet Rusia. Hal itu sejalan dengan program komunis internasional sebagaimana yang telah digariskan oleh Zhadanov dengan "Two Camp Doctrine" nya.

⁷⁰Nasution A.H., Op.Cit. hal.190-198

⁷¹Ibid, hal.239-240

⁷²Ibid, hal.209

C. Pemberontakan PKI berkobar

1. Persiapan pemberontakan

Pada hari kedua setelah meletusnya pemberontakan PKI 18 September 1948 di Madiun, ditemukan dokumen dari almari Amir Syarifuddin oleh Kapten Maulana prajurit Siliwangi. Dari dokumen tersebut diketahui bahwa pemberontakan PKI sudah lama dipersiapkan. Isi dokumen tersebut bertolak dari kekuatan riil dari FDR/PKI yang menyatakan Tentara atau Angkatan Bersenjata yang ada dalam Republik Indonesia dapat dikuasai atau dapat dipengaruhi atau dapat dinetralkan oleh FDR/PKI. Lebih kurang 35% dari Angkatan Bersenjata dikuasai oleh FDR/PKI, sedang yang lainnya dalam prosentase yang agak besar ada dalam pengaruhnya dan apabila sesuatunya berjalan menurut rencana, beberapa dari kesatuan-kesatuan tersebut akan membantunya. Kemudian yang lainnya akan dibuat dalam posisi atau keadaan yang netral.⁷³

Dalam dokumen tersebut dirancangkan strategi atau siasat yang dibagi dalam dua fase. Fase pertama akan ditempuh dengan "Jalan Parlemerter", sedang apabila fase pertama ini gagal akan ditempuh fase kedua dengan "Jalan non Parlemerter".

Fase Parlemerter diformulasikan sebagai berikut :

- a. Mempengaruhi Panitia Kerja (dari Parlemen-KNIP) dalam menyampaikan mosi, dimana dinyatakan bahwa Program Nasional dijadikan Program Pemerintah dan untuk itu pemerintah yang sekarang ini harus dibubarkan dan suatu kabinet baru yang bertanggung jawab (Kabinet Parlemerter) dibentuk.
- b. Mempercepat pembentukan (organisasi) Front Nasional, terutama Front Nasional Daerah;
- c. Front Nasional akan memainkan perjuangan politik secara besar-besaran untuk memusnahkan kabinet yang sekarang ini;
- d. Jika rencana tersebut diatas gagal, demonstrasi secara besar-besaran akan diselenggarakan oleh buruh,

⁷³Kahin G.Mc.T. Opisit, hal.270

petani, tentara dan golongan-golongan lain yang dapat diinsafkan untuk bergabung dengan kita.... Demonstrasi secara besar-besaran, diikuti secara langsung oleh pemogokan umum dan kalau perlu (diikuti) oleh tindakan kekerasan;

1. Dalam aksi massa ini, buruh, petani dan tentara turut ambil bagian, yang akan menjalankan peraturan secara baik
2. Kader-kader tentara yang memimpin aksi massa, haruslah orang-orang yang telah memiliki pendidikan politik dan ideologi yang sesuai dengan pertanggung jawaban yang kita berikan kepada mereka;
3. Aksi massa ini hanya harus diselenggarakan didaerah-daerah dimana kita mempunyai kekuatan militer yang cukup, untuk mengimbangi kekuatan musuh".⁷⁴

Apabila jalan parlementer ternyata tidak berhasil maka dengan strategi atau siasat digantikan dengan jalan yang kedua yang non parlementer, dengan mengadakan pemberontakan untuk membentuk pemerintahan komunis dibawah FDR/PKI.

Untuk hal tersebut perlu adanya persiapan sebagai berikut :

- "1. Menarik pasukan-pasukan kita dari garis depan(yaitu "garis status quo" yang memisahkan daerah-daerah pendudukan Republik dan Belanda).
 - a. Brigade Martono dan Yadau akan diinstruksikan untuk memperkuat operasi intern kita .
 - b. Jika kita dipaksa untuk mengirimkan pasukan ke garis depan, maka pasukan-pasukan yang belum kita percayai 100%, akan kita kirimkan.
2. Pemindahan pasukan-pasukan kita kedaerah-daerah, yang kita anggap strategis dan meninggalkan daerah-daerah yang tak dapat dipertahankan lebih lama lagi,
 - a. Daerah Madiun akan dibuat kubu gerilya yang terkuat untuk perjuangan jangka panjang.
 - b. Kita harus menempatkan paling tidak lima batalyon di Madiun, yang harus sudah ada disana pada bulan ini atau dalam bulan Agustus.

⁷⁴Kahin, Loc.Cit.

- c. Solo (Surakarta) akan kita buat suatu daerah "Wild West" untuk menarik perhatian disana, tetapi kita harus mempunyai pasukan-pasukan paling kuat di Solo, sehingga kekuasaan secara de facto selalu ditangan kita.
 - d. Kedu, Yogyakarta, Pati, Semarang, Bojonegoro, Surabaya dan Kediri (Karesidenan-karesidenan dimana daerah itu dikuasai republik) akan kita buat daerah ~~daerah~~, yang berarti karena keadaannya, kita akan memperkuat daerah-daerah tersebut atau meninggalkannya. Kekuatan pada tiap-tiap daerah-daerah ini tidak boleh melebihi dua batalyon.
 - e. Kita dapat mengosongkan daerah-daerah Malang, Banyumas dan Pekalongan secara total (ini adalah wilayah yang berdekatan dengan daerah yang dikuasai oleh republik, yaitu daerah Madiun).
3. Disamping angkatan-angkatan bersenjata yang resmi, sekarang kita harus mulai membentuk tentara rakyat secara illegal :
- a. Ditiap-tiap sub distrik, yang kita pertimbangkan strategis dan dimana pengaruh kita telah ditanamkan akan ditempatkan 60 prajurit bersenjata, yang dipimpin oleh seorang komandan.
 - b. Enam puluh orang tersebut akan dibagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang terdiri dari 6 atau 10 orang dan dikirimkan kedesa-desa.
 - c. Pimpinan umum di subdistrik adalah dalam tangan komite/panitya yang diwakili buruh, petani dan komandan dari 60 tentara yang dipersenjatai tersebut.
4. Program kita untuk fase kedua dapat ditentukan lebih lanjut, sesuai dengan keadaan. Sebelumnya kita dapat menyatakan bahwa kita harus merealisasikan Program Nasional, teristimewa mengenai land reform, pertahanan rakyat dan perjuangan buruh".⁷⁵

Pada pertengahan Juli langkah-langkah untuk mempengaruhi BP-KNIP menjadikan Program Nasional sebagai Program Pemerintah dalam kabinet yang baru (Kabinet Parlemonter) menggantikan Kabinet Hatta yang presidensiil, tidak berhasil, Begitu juga u-

⁷⁵Kahin, Op.Cit. hal.271

saha untuk membentuk Front Nasional yang berintikan kekutan mereka, gagal. Maka dengan segera mereka mengadakan aksi-aksi massa dengan mengadakan pemogokan-pemogokan.

Pada bulan Agustus berturut-turut terjadi pemogokan bu-
ruh minyak Cepu, pemogokan pegawai kotapraja Madiun dan insi-
den di Solo antara pasukan FDR/PKI dengan lawan-lawannya yang
pro pemerintah.

Di daerah Solo terdapat berbagai pasukan yang saling
bertentangan tajam. Disatu pihak terdapat divisi IV "Panemba-
han Senopati" yang sudah terpengaruh oleh politik FDR/PKI;
yang kemudian divisi IV ini diubah menjadi Komando Pertempu-
ran Panembahan Senopati dengan Kolonel Sutarto sebagai Koman-
dan, dan terbagi menjadi lima brigade, masing-masing dipimpin
oleh Let.Kol.Suadi, Let.Kol.Sudiarto, Let.Kol.Suyoto, Let.Kol.
Yadau, Let.Kol.Iskandar.

Sedang dilain pihak terdapat Brigade 13 "Siliwangi",
yang karena kondisi tidak memungkinkan ditempatkan menjadi
satu didalam kota, maka pasukan-pasukannya ditempatkan diluar
kota Solo, di [~]rambatan, di ^Pabrik Colomadu dan Tasikmadu. Ju-
ga terdapat pasukan Hizbullah, yang keduanya dikenal sebagai
pasukan yang pro pemerintah Hatta. Disamping itu terdapat pa-
sukan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) dan pasukan
Barisan Banteng pimpinan Dr.Muwardi, yang berada dibawah pe-
ngaruh Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) yang anti politik FDR/PKI.⁷⁶
Selain itu juga terdapat Tentara Pelajar pimpinan Mayor Akh-
madi yang bersifat netral.

Kegagalan FDR/PKI mempengaruhi Siliwangi membuat sua-
sana politik di Solo semakin eksklusip dan suasana curiga men-
curigai menguasai segala pihak. Oleh karena sejak itu FDR/PKI

⁷⁶Nasution A.H., Op.Cit. hal.217 dan Mochkardi, Op.Cit.
hal. 88

berusaha menjelekkan nama Siliwangi dan mengadakan kampanye anti Siliwangi. Terhadap pasukan tersebut dilancarkan desas-desus yang memanasakan hati prajurit Siliwangi :

"SLW singkatan Siliwangi didesas-desuskan sebagai singkatan dari "Stoot Leger Wilhelmina", atau pasukan tempur Wilhelmina (Raja Belanda). Penempatan Siliwangi dipabrik-pabrik gula didesas-desuskan sebagai alat Van Mook untuk menyelamatkan harta milik Belanda di Indonesia dan sebagainya, suatu hal yang benar-benar memanasakan hati prajurit Siliwangi".⁷⁷

Dalam suasana demikian, di utara Solo terjadi perlucutan senjata terhadap Mabrig oleh Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) dibawah pimpinan Let.Kol.Yadau yang komunistis, yang sangat memanasakan polisi. Akan tetapi peristiwa tersebut tidak sampai menimbulkan insiden bersenjata yang berkelanjutan.

Insiden bersenjata pertama terjadi antara pasukan Siliwangi dengan pasukan Panembahan Senopati, yaitu penyerangan pasukan Panembahan Senopati yang dibantu Tentara Pelajar liar (karena tertipu pasukan Yadau) terhadap Batalyon Rukman di Tasik madu, yang menurut Nasution beberapa hari sebelum kejadian tersebut disinyalir adanya pemusatan pasukan yang tidak dikenal, ditaksir lebih kurang mencapai dua batalyon. Serangan tersebut dapat dipukul mundur oleh pasukan Siliwangi dengan korban 7 orang mati dan beberapa orang luka-luka dari pihak penyerang.⁷⁸

Pada hari yang sama yaitu tanggal 24 Agustus 1948 terjadi penyerbuan terhadap rumah penjara Sragen, 40 km. timur Solo, oleh serombongan orang yang tidak diketahui asalnya, dan mengeluarkan 14 orang tawanan TP dalam pembersihan tanggal 27-Maret 1948, diantaranya Let.Kol.Anwar dan Let.Kol.Goenarjo.⁷⁹

⁷⁷Moehkardi, Op.Cit. hal.89

⁷⁸Nasution A.H., Op.Cit. hal.218 dan 221

⁷⁹Ibid., hal.221

Suasana "Wild West" di Solo semakin meningkat dengan diculiknya Dr. Muwardi seorang tokoh Barisan Banteng, dan tiga orang anggota GRR pada tanggal 13 September, oleh gerombolan bersenjata. Sebelumnya juga sudah terjadi penculikan terhadap Let. Kol. Suharman dari TNI bagian masyarakat.⁸⁰ Suasana demikian semakin memuncak dengan penyerangan atas asrama Stafdekking Brigade 13 "Siliwangi" di Srambatan. Menurut Kapten Oking Komandan Stafdekking Markas Siliwangi di Srambatan bahwa :

"...fihak penyerang adalah beberapa batalyon, yang datang seperti dalam "manouvre" (latihan).... Pertempuran berakhir sore hari ketika para penyerang mengundurkan diri. Empat belas mayat tertinggal".⁸¹

Dengan adanya peristiwa Srambatan itu Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah Cease Fire di Solo, maka untuk merundingkan penyelesaian diadakan di Balai kota, akan tetapi pertemuan itu tidak mencapai penyelesaian. Dalam hal itu Let. Kol. Sadikin (dari Siliwangi) bersikap, bahwa pihaknya yang diserang, jadi bagaimanapun juga mau diselesaikan "terserah kepada yang menyerang".⁸² Dalam pada itu Nasution sebagai Wakil Panglima Besar Sudirman, yang waktu itu sedang mendampingi di Magelang mengirimkan kawat kepada Let. Kol. Sadikin agar mem-bela kehormatan "Siliwangi" dalam keadaan bagaimanapun juga.⁸³ Berhubung dengan kekacauan di Solo itu pada tanggal 15 September Panglima Besar Sudirman mengeluarkan Perintah Harian dengan tegas dinyatakan sebagai berikut :

"Pada saat ini terjadi suatu peristiwa di Surakarta yang langsung menyinggung kedaulatan Angkatan Perang,

⁸⁰ Moehkardi, Op.Cit. hal.90

⁸¹ Nasution A.H., Op.Cit. hal.225

⁸² Ibid, hal.226

⁸³ Ibid, hal.228

yakni terculiknya anggota-anggota AP. Maka disini kami tegaskan : AP supaya bulat bersatu terhadap pihak manapun yang berusaha mengacaukan atau melanggar kekuasaan⁸⁴ dan kedaulatan negara, dan harus serentak menghadapinya!

Pada hari itu juga bantuan pasukan Siliwangi dari Yogyakarta yang dapat perintah untuk menduduki kota Solo mulai memasuki kota, tetapi dihalang-halangi oleh pasukan Panembahan Senopati dan akibatnya pertempuran tak dapat dihindarkan. Keadaan ini semakin menghangat lagi ketika pada tanggal 16 September Barisan Banteng menyerbu Markas Pesindo, yang kemudian pertempuran ini meluas keseluruh kota.⁸⁵ Sedang bantuan dari pasukan Let. Kol. Yadau yang ditarik dari front, berhasil dicegat pasukan Siliwangi di luar kota.

Untuk mengatasi hal tersebut pada tanggal 16 September Kolonel Gatot Subroto selaku Ketua CPM, diangkat sebagai Gubernur Militer di Solo, dengan kekuasaan penuh untuk menumpas semua kerusuhan dan merasionalisasi pasukan. Dengan kekuatan yang tidak utuh lagi pihak penyerang mencoba mengkoordinir kembali pasukannya untuk merebut kota Solo yang telah dikuasai pasukan Siliwangi, tetapi berhasil di-pukul mundur.

Peristiwa Solo yang memang sudah dipersiapkan PKI untuk menarik perhatian lawan dan tetap berada dalam kekuasaannya lawan dan tetap berada dalam kekuasaannya, ternyata merupakan awal kekalahannya. G.Mc.T.Kahin Sejarawan Amerika, menilai peristiwa terpukul mundurnya PKI di Solo tersebut sebagai suatu titik kekalahannya yang penting atau kalah sebelum mulai.⁸⁶

Di Madiun sesuai dengan bunyi dokumen, direncanakan sebagai kubu gerilya dengan mempergunakan minimal 5 batalyon, ma-

⁸⁴ Ibid, hal.229

⁸⁵ Ibid, hal.223 dan Moehkardi, Loc.Cit.

⁸⁶ Kahin G.Mc.T., Op.Cit. hal.291

ka selain pasukan yang sudah ada, PKI memindahkan Brigade 29 (pasukan eks Pesindo) dari Kediri yang masing-masing; Batalyon Musyofa ditempatkan di Madiun, Batalyon Mursid ditempatkan di Saradan, Batalyon Darmintoaji ditempatkan di Ngawi, Batalyon Panjang Jokopriyono ditempatkan di Ponorogo, Batalyon Maladi Yusuf menyusul Batalyon Abdul Rachman yang ditempatkan di Ponorogo dan Sumoroto.⁸⁷

PKI juga mempersiapkan pemberontakan dengan mengadakan rapat-rapat umum untuk menggerakkan massa didaerah-daerah. Pimpinan PKI Muso, Amir Syarifuddin, Wikana dan lain-lain mengadakan kunjungan kedaerah-daerah; Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu dan banyak tempat lain lagi.⁸⁸ Menurut Muhammad bin H.Thoha, rapat-rapat PKI tersebut untuk menambah militansi kepada pengikut-pengikutnya terutama di Madiun, menunjukkan massa aksinya dan menakuti kepada masyarakat terutama lawan PKI bahwa PKI merupakan kekuatan yang riil dan kompak.⁸⁹ Di ibu kota RI Yogyakarta, dipersiapkan juga pemberontakan PKI yang dimulai dari Madiun tersebut, pada tanggal 17 September 1948 Politbiro PKI bersidang, dan pada hari itu juga bersidang SBKA dari SOBSI. Esok harinya SC PKI juga mengadakan sidang dihadiri oleh Suripno, Maruto Darusman, Njoto dan Lukman.⁹⁰

2. Jalannya pemberontakan

Pada tanggal 18 September 1948 dinihari di Madiun dicituskan pemberontakan PKI, dengan siaran dari "Radio Gelora Pemuda", yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

⁸⁷Nasution A.H., Op.Cit. hal.261

⁸⁸Abu Hanifah, Op.Cit. hal.99

⁸⁹Muhammad bin H.Thoha, Loc.Cit.

⁹⁰Nasution, Op.Cit. hal.239

"...dari Madiun telah bangun untuk membasmi semua musuh revolusi : Polisi, Polisi Tentara, dan Tentara telah dilucuti senjatanya oleh rakyat. Kaum buruh dan kaum tani telah membentuk suatu pemerintahan baru. Senjata kita akan digunakan terus hingga seluruh Indonesia telah dimerdekan, saat untuk revolusi telah tiba..."⁹¹

Pemberontakan komunis di Madiun dimulai dengan tembakan revolver tiga kali, kemudian PKI menyerang semua perusahaan penting-penting, kantor-kantor pemerintah seperti, Kantor Besar Polisi, Kantor Komando Tentara, Kantor Pos dan Telegraf, dan Kantor Bank. Pada pukul 09.00 PKI telah berhasil menduduki markas-markas SPDT, STM Madiun, Batalyon CPM dan tangsi-tangsi Polisi dengan melucuti total anggota-anggota kepolisian, kemudian ditawan dipenjara Kletak.⁹²

KH. Darussalam, yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa pemberontakan tersebut menyatakan bahwa pada malam hari ketika memimpin rapat Sabilillah dan Hizbullah di jalan Merdeka, Madiun, mendengar suara tembakan. Pagi harinya PKI mengangkut alat-alat kantor dan berteriak "PKI menang".⁹³

PKI menguasai alat komunikasi seperti, Studio RRI Madiun, Kantor Pos dan Telegraf, mass-media dan perusahaan vital lainnya. Dibawah pimpinan Batalyon Musyofa, secara serentak dapat merebut pusat-pusat pertahanan TNI, Kantor-kantor pertahanan daerah, Kantor Pemerintah dan lain sebagainya.

Dari pihak Republik Indonesia yang pertama kali mengadakan perlawanan mempertahankan Madiun, adalah Korps Kepolisian Madiun dibawah Komisaris Polisi Raden Sunaryo, Akhirnya PKI dapat menguasai seluruh kesatuan seperti Mobile Brigade, Kepolisian Daerah, Sub Teritorium Militer, Staf Pertahanan Jawa Timur, Po-

⁹¹ Ibid, hal.235

⁹² Ibid, hal.237 dan 254

⁹³ Wawancara dengan KH. Imam Darussalam, 29 Juni 1981, di Madiun

lisi Tentara, Tentara Republik Indonesia Pelajar, Kantor Sipil Kota praja Madiun, Kantor Sipil Kabupaten Madiun dan Kantor Sipil Karesidenan Madiun.⁹⁴ Maka diumumkan susunan pemerintahan PKI yang disebut "Pemerintah Front Nasional" sebagai pengganti Pemerintah Republik Indonesia. Dalam Buku Akademi Militer Yogya dinyatakan :

"Sehari kemudian, selagi perhatian orang masih terpusat ke Solo, tiba-tiba pada tanggal 18 September 1948, pasukan Brigade 29 TNI masyarakat pimpinan Let.Kol.Dahlan dan pasukan Pesindo pimpinan Sumarsono merebut kekuasaan di Madiun. Dan melalui radio Madiun pada pagi jam 10.00 kemudian diumumkan pembentukan "Pemerintahan Front Nasional" daerah Madiun, lengkap dengan nama-nama pejabat baru, wali kota, bupati, residen dan gubernur militer yang semuanya dijabat oleh orang-orang FDR/PKI. Sedang Sumarsono sendiri menjabat sebagai Gubernur Militer. Dalam pidato radionya yang penuh optimis Sumarsono berseru kepada kaum komunis agar mengikuti jejaknya, dan pada akhir pidatonya ia berkata; "...Dan dari Madiun dimulai kemenangan..."⁹⁵

Diantara susunan pemerintahan tersebut terdapat :

- Sumarsono : sebagai Gubernur Militer dibantu oleh Supardi bekas Wakil Wali Kota Madiun.
- Djekosujono : sebagai Komando Militer (bekas pimpinan Tertinggi TNI bagian masyarakat).
- Abdul Mutalib : sebagai Residen (bekas Wakil Residen Surabaya yang berkedudukan di Jombang).⁹⁶

Pada tanggal 19 September PKI¹ mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap opsir-opsir CPM- Opsir-opsir bekas Teritorial Kommando Jawa Timur, Kepala Kepolisian, Pemimpin-pemimpin sipil penting lainnya juga pemimpin partai lawannya. Pada jam 13.00 hari itu juga ditangkap Perwira Staf Pertahanan Jawa Timur antara lain, Let.Kol.Marhadi, Let.Kol.Wijono, Kapten Bismo, Kapten Kartidjo, Kapten Sidik Parwoko dan Letnan Tjuk Harsono. Mereka ditawan di Markas Batalyon Musyofa di Motor Cycle Service, Jalan Raya, yang kemudian dibawa ke Kresek, Dungus.⁹⁷

⁹⁴ Sejarah Kabupaten Madiun (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, 1980), hal.309-310

⁹⁵ Moehkardi, Op.Cit. hal.192

⁹⁶ Nasution A.H., Op.Cit. hal.225

⁹⁷ Ibid, hal.237-238

Semua kepala jawatan diganti atau kalau tidak, diadakan suatu dewan pimpinan sebagai pendamping yang berkewajiban menjaga dan mengatur segala pekerjaan. Seluruh TNI dilucuti dan Kepolisian dibubarkan, digantikan dengan tenaga-tenaga baru. Dewan desa banyak yang bdiorganisasi sesuai dengan keadaan. Setelah keadaan di jalan dan lalu lintas ramai kembali, banyak motor-motor dan truk-truk yang mondar-mandir dengan bendera merah. Begitu juga setelah kantor pemerintah dan swasta, sekolah-sekolah, pasar-pasar dan toko-toko telah dibuka kembali tetapi keadaannya tak seramai hari-hari sebelum pemberontakan. Harian Api Rakyat diganti namanya dengan Front Nasional yang dipimpin oleh Basuki (pesindo) dan pemimpin redaksinya Oei Cee (partai Sosialis). Jam malam diberlakukan mulai pukul 23.00 sampai 05.00. Semua kantor dan jawatan harus dijaga siang dan malam oleh buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang apabila terjadi pengacauan harus dilaporkan kepada penguasa pemberontak. Juga penguasa pemberontak mengatur masalah keuangan setiap perusahaan jawatan dan lain sebagainya. Di Madiun tidak lagi berkibar Bendera Merah Putih, akan tetapi berkibar bendera Merah (PKI). Untuk mengkoordinasi semua kekuatan untuk menuju kemenangan yang lebih lanjut maka diselenggarakan rapat-rapat bertempat di Balai Rakyat yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, Muso, Djokosujono dan pemimpin-pemimpin PKI lainnya. Sebagaimana dikatakan dalam pidato radionya oleh PKI, Sumarsono, bahwa dari Madiun dimulai kemenangan, yang akan dilanjutkan kemenangan-kemenangan itu, sehingga RI dapat dimenangkan komunis.

Pada tanggal 22 September Djokosujono menyampaikan undangan lewat siaran Radio ⁴elora Pemuda kepada sejumlah komandan TNI untuk berkonferensi tanggal 24 September bertempat di Balai kota Madiun. Diantara yang diundang adalah Panglima Pertahanan Jawa Timur, Komandan Brigade Mobil Jawa Timur dan komandan-komandan seluruh kesatuan militer lainnya diseluruh daerah

Republik di Jawa Timur. Komandan-komandan yang diundang tidak sedikit yang datang menghadiri, akan tetapi dengan berbagai motivasi. Ada yang datang dengan sepenuh hati menerima dan menanggapi maksud si pengundang, tetapi ada pula yang hanya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan yang terjadi di Madiun. Termasuk yang tera khir ini adalah Let.Kol.Suharto dari Yogyakarta, yang datang atas perintah khusus Panglima Besar Sudirman.⁹⁸

Penguasa pemberontak di Madiun berusaha menunjukkan keadaan yang tenteram dan berjalan dengan baik. Kepada para undangan, penguasa pemberontak menitipkan surat-surat dan usul-usul kepada berbagai instansi dan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Akan tetapi keadaan berbalik dari yang diharapkan oleh penguasa pemberontak.

Pemerintah Republik Indonesia membalas sebagaimana yang diumumkan oleh Panglima Besar Sudirman tanggal 23 September, yang berisi antara lain bahwa Kejaksaan Tentara Republik Indonesia telah mendakwa sejumlah opsir tinggi yang telah memberontak dan akan dituntut di Mahkamah Tentara, termasuk Kolonel Djokosujono, Kol.Ir.Sakirman, Let.Kol.Martono Brotokusumo, Mayor Anas, Mayor Pamudji, Mayor Banumahdi, Mayor Usman dan Kapten Misbah. Selanjutnya Markas Besar Tentara Republik Indonesia menyiarkan bahwa setiap anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang memenuhi undangan Djokosujono di Madiun tanggal 22 September 1948 guna berunding akan dianggap sebagai pemberontak terhadap Negara Republik Indonesia. Kemudian oleh penguasa pemberontak Madiun dinyatakan dalam keadaan bahaya, berhubungan dengan keadaan genting didaerah ini.

Pencetusan pemberontakan di Madiun tanggal 18 September 1948 ternyata telah dimulai sejak tanggal 12 September sebelum-

⁹⁸Ibid, hal.257

nya dengan merebut kekuasaan didesa-desa sekitar daerah Madiun.

"Semenjak tanggal 12 September 1948, dengan cara yang teratur sekali, ternyata mereka telah merebut kekuasaan didesa-desa yang terletak disekitar Madiun. Pada tanggal 18 September 1948 selesailah perebutan kekuasaan atas seluruh Madiun. Dan dari sana kaum komunis merencanakan hendak menguasai seluruh Jawa dan RI. Kepada rakyat mereka mengatakan, bahwa pemerintah Sukarno-Hatta telah hancur".⁹⁹

Kerusuhan-kerusuhan yang diadakan PKI didaerah kecamatan Kebonsari dan Kecamatan Dagangan, Madiun, dengan penyerobotan-penyerobotan tanah mendapat tantangan hebat dari STII dan Hizbullah. Patokan-patokan tanah yang ditancapkan PKI sebagai tanda pembagian tanah, dicabut kembali oleh STII dan Hizbullah. Pemberontakan PKI di Madiun kemudian segera diikuti secara serentak oleh PKI didaerah-daerah lain sekitar Madiun. Di Takeran, Magetan, PKI menangkap pimpinan dan warga Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) kemudian dibunuh. Dimulai dengan latihan-latihan oleh PKI disekitar pesantren dengan menggunakan kode tertentu yang dikenal dengan "irken" (irama kentongan) kemudian mereka menyerbu pesantren. Kyai Imam Mursyid Muttaqin pimpinan umum Pesantren Sabilil Muttaqin berhasil ditawan dan hingga kini belum ada keterangan yang pasti tentang dirinya. Kyai Imam Mursyid Muttaqin juga sebagai Ketua Masyumi dan hampir semua santri PSM menjadi anggota pasukan Hizbullah dan Sabilillah.

PSM Takeran tersebut menurut kesepakatan para Kyai dan Ulama menjadi dapur umum atau markas belakang, sedang pesantren Termas, Gontor dan yang lain menyediakan dan mengkoordinir tenaga/pasukan. Adapun sebagai markas depan yang mengatur serangan kedaerah Surabaya yang diduduki Belanda adalah pesantren Tebuireng Jombang. Pemberontak PKI juga menangkap dan membunuh a-

⁹⁹Ibid, hal.239

nak buah Kyai Imam Mursyid Muttaqin antara lain :

1. Kyai Moh. Noor, Wakil Pimpinan PSM dan Fuqoha' ;
2. Imam Faham, guru bahasa Inggris dan ilmu pasti ;
3. Moeh. Soehoed, anggota Majelis Pendidikan PSM ;
4. Moeh. Maidjo, Kepala Madrasah Ibtidaiyah PSM ;
5. Reksosiswojo, guru bahasa daerah ;
6. Kyai Badawi, guru Agama ;
7. Ustadz Haði Adaba', guru bahasa Arab (WNI keturunan Arab) ;
8. Moeh. Nurun, anggota pengurus PSM ;
9. Imam Dihardjo (Kadimin), anggota pengurus PSM ;
10. Hartono, guru pedagogik (ilmu pendidikan) ;
11. Rofi'i, penasehat PSM ;
12. Prijo Hutomo, penasehat PSM ;
13. Husain, Ketua Pelajar Mu'allimin PSM".¹⁰⁰

Di Cigrok (sekarang Kenongo Mulyo), Takeran, dikatakan oleh KH. Muhyidin bahwa PKI yang dipimpin oleh Sariyo (jagoan) merampas harta penduduk. Pada waktu itu kemudian Sariyo dan anak buahnya mengadakan arak-arakan (pawai keliling) dengan dokar dan berpakaian haji hasil rampasan. Ia sendiri ditangkap oleh PKI, tetapi karena lindungan Allah Swt. dengan sedikit diplomasi ia berhasil lolos. Dikatakan juga bahwa ada 23 orang yang dihunuh oleh PKI dan dimasukkan di sumur lama Cigrok, antara lain : seorang camat, enam guru PSM Takeran (termasuk seorang guru keturunan Arab, bernama Adaba') dan Kyai Imam Sofwan Selopuro, Kebonsari, bersama kedua putranya, Letnan Bawani dan Letnan Muda Zuber.¹⁰¹

Dikatakan oleh KH. Jamal bahwa PKI dengan kekuatan lebih kurang 3.00 orang pada hari Sabtu Wage pukul 07.00 tanggal 18-September 1948 menyerang Tegal Rejo, Takeran. Serangan itu berhasil dipertahankan oleh tujuh orang Kyai : Kyai Imam Mulyo, Kyai Mohammad Rahmat, Kyai Mohammad Bakir, Kyai Mohammad Daud,

¹⁰⁰ Sapari Imam Asy'ari, Pesantren Sabilil Muttaqin (Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan Departemen Agama RI, 1979), hal. 44

¹⁰¹ Wawancara dengan KH. Muhyidin, 29 Juni 1981, di Madiun

Kyai Mohammad Jamal, Kyai Mohammad Taat dan Kyai Mohammad Idris. Akan tetapi pada pukul 15.00 hari itu juga PKI menyerang lagi dengan kekuatan lebih kurang 5.000 orang dengan bersenjata otomatis dan granat tangan. Sedang di Tegal Rejo bergabung dengan tujuh Kyai tersebut menjadi kekuatan lebih kurang 2.000 orang terdiri dari orang PNI, Sabilillah dan Hizbullah yang bersenjata wesi aji berupa pedang, keris, tombak dan granggang. Dalam perang tandung, Kyai Mohammad Daud dengan pertolongan Allah swt. setelah dibacakan "Aji Gelap Sayuto", PKI mundur dengan menderita luka 5 orang dan 90 buah granat tertinggal. Sedang korban dipihak orang-orang Tegal Rejo seorang luka. Akhirnya PKI dengan jalan diplomasi lewat Imam Bukhori, menculik dan menahan 18 orang Tegal Rejo terdiri dari tujuh Kyai tersebut bersama putra-putranya. Mereka ditahan selama 9 hari di Baeng, Takeran, dan mereka dapat lolos dari rencana pembunuhan PKI, karena orang-orang PKI didaerah Gorang Gareng telah kalah dan melarikan diri.¹⁰²

KH.Kubro yang pada tahun 1948 sebagai Kepala Staf Pasukan Sabilillah Tingkat Resimen, mengatakan bahwa PKI membakar masjid Tempur Sari sebagai pertahanan Sabilillah, serta merusak harta penduduk. Pada waktu PKI akan menyerang Pondok Pesantren Bacem, Kebonsari, yang dipimpin K.H.R.Adnan, dengan kuasa Allah swt. orang-orang PKI tertidur di rel kereta api itu.

Dikatakan juga bahwa yang menjadi korban keganasan orang-orang PKI antara lain :

1. K.H.Imam Sofwan dari Selopuro, Kebonsari;
 2. Letnan Bawani, putra K.H.Imam Sofwan;
 3. Letnan Muda Zuber, putra K.H.Imam Sofwan;
- Ketiganya dibawa ke Cigrok, Magetan, kemudian dimasukkan ke sumur.

¹⁰²Wawancara dengan K.H.Jamal, 29 Juni 1981, di Magetan

4. Kyai Abdul Malik dari Dagangan;
5. Kyai Zuber dari Sewulan;
6. Kyai Sidik dari Prambon;
7. Rama Khusein dari Dagangan;
8. 18 orang dan sejumlah Hizbullah dikubur di Selaung Ponorogo.

Sedang yang diculik antara lain :

1. Kyai Cholik dari Kebonsari;
2. Kyai Bajuri dari Kebonsari;
3. Kyai Surur dari Kebonsari;
4. Kyai Sewoyo dari Kebonsari.¹⁰³

Kusnindar, yang pada tahun 1948 sebagai Komandan Hizbullah Ngendut, Kebonsari, mengatakan bahwa orang-orang PKI berhasil menahan lima orang lawannya yaitu ia sendiri, Mariyun dari PNI dan sebagai SODM Kecamatan Kebonsari, Surur dari Hizbullah, Kyai Cholik dan Kyai Hadi.

Kusnindar sendiri berhasil lolos dan Mariyun yang telah dibunuh oleh PKI ternyata dengan luka-lukanya yang parah dapat ditolong oleh penduduk setempat kemudian dibawa ke dr. Sumali, Magetan. Ia sekarang berhasil sembuh dengan bekas luka-lukanya yang sangat dan cacat.

Mariyun yang telah menambah Harjo didepan namanya, setelah diwawancarai mengatakan bahwa pemberontakan PKI mengambil sasaran :

1. Tokoh-tokoh pemerintah, Tentara dan Polisi;
2. Tokoh Islam / Masyumi;
3. Tokoh Nasionalis.¹⁰⁴

Di daerah Dagangan, Madiun, PKI menawan pengurus Masyumi dan GPII antara lain :

1. Mohammad Bajuri
2. Cholik;

¹⁰³Wawancara dengan KH. Kubro, 29 Juni 1981, di Madiun

¹⁰⁴Wawancara dengan Kusnindar, 29 Juni 1981, dan Harjo Mariyun, 10 Juli 1981, di Madiun

3. Darmo Sutaji;
4. Mahfudz Siddik;
5. K.H.Zuber;
6. Kamino.¹⁰⁵

Di Kresek, Dungus, bersama Kyai Zuber dibunuh pula Kyai Sidik dengan diikat lehernya dan diseret dari jarak jauh, kemudian dikubur hidup-hidup. Karena keduanya ternyata "kebal segala senjata". Kuburnya sekarang (1981) oleh Kepala Desa Kresek, Dungus, dihapus bekas-bekasnya, sebab Kepala Desa tersebut ada indikasi terlibat pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun.¹⁰⁶

Di Brojo, Kresek, juga terjadi korban pembunuhan (termasuk Kolonel Marhadi) sejumlah 129 orang. Sebenarnya 130 orang, tetapi yang seorang ternyata masih hidup sampai sekarang dan menderita kelainan jiwa. Korban tersebut dibunuh di rumah pak Soma Rajimin dan sekarang dibeli oleh pemerintah, dijadikan Taman Pahlawan sebagai peringatan.¹⁰⁷

Di Sidorejo, Kebonsari, dua orang Kyai yaitu Kyai Haji Zainal Abidin dan Kyai Haji Imam Mughni ditangkap oleh PKI kemudian diarak dan diikat tangannya dengan janur kuning ke kantor Kepala Desa. Kedua Kyai tersebut pura-pura menyatakan tunduk kepada PKI, kemudian dilepaskan dan bebas dari rencana pembunuhan PKI.¹⁰⁸

Di Rejosari, Kebonsari, PKI berhasil menangkap tokoh GPII dan Komandan Tempur Hizbullah Kebonsari yaitu dua orang bersaudara, In'am dan Sudirman. Tetapi keduanya dapat lolos dan selalu lepas dari kejaran orang-orang PKI yang akhirnya keduanya

¹⁰⁵Wawancara dengan K.CHolik Chasbullah, 11 Juli 1981, di Madiun

¹⁰⁶Wawancara dengan Qoyyumiati Urifah, 9 Juli 1981, di Dungus, Madiun

¹⁰⁷Loc.Cit.

¹⁰⁸Wawancara dengan H.Maryam, 28 Juni 1981, di Madiun

ikut menumpas orang-orang PKI didaerah Kebonsari dan Takeran, Magetan.¹⁰⁹

Menurut Mohammad Kunsyarwani yang pada tahun 1948 menjabat Komandan Resimen Hizbullah Madiun, menyatakan bahwa pada pemberontakan tersebut orang-orang PKI tidak hanya menculik, menahan dan membunuh lawan-lawannya, akan tetapi juga membakar rumah-rumah dan mengadakan perampokan-perampokan.¹¹⁰

Pemberontakan PKI menimbulkan pembunuhan besar-besaran, yang terkena antara lain :

"Di Magetan, Bupati dan lain-lain anggota PN;
Di Gorang Gareng, tempat tawanan CPM/PN dan lain-lainnya;
Di Dungus Kresek, tempat tawanan orang-orang terkemuka militer, sipil, partai, pelajar dan orang-orang agama;
Tidak ketinggalan juga pembumi hangusan dimana-mana, antara lain juga sebagian dari Cepu".¹¹¹

Geografi pemberontakan PKI meluas jauh keluar dari daerah Madiun. PKI menyerang aparat pemerintah RI daerah setempat dengan banyak menimbulkan korban dan kerugian bagi rakyat. Di daerah Magelang, PKI dengan kekuatan bekas lasykar rakyat dari Kolonel Ir. Sakirman, pemuka komunis, dan di Parakan dengan bantuan bekas Biro Perjuangan membentuk suatu "Pemerintah Front Nasional". Mereka merebut kekuasaan disekitar Sawangan dan Tegal Rejo, sebelah timur Magelang. Di Mertoyudan, sebelah selatan Magelang PKI menyerang polisi. Demikian juga di Sorong dan Pakelan. Di Candirote mereka menculik Mayor Salamun dan Mayor Sukri, tetapi berhasil lolos, sedang penghulu dan asisten Weda-

¹⁰⁹ Wawancara dengan Sudirman, 2 Juli 1981, di Madiun

¹¹⁰ Wawancara dengan M. Kunsyarwani, 2 Juli 1981, di Madiun

¹¹¹ Nasution A.H., Op.Cit. hal.280

na Parakan tidak diketahui nasibnya. Di Sukoharjo, Solo selatan PKI mengundurkan diri ke jurusan Wonogiri dengan menghancurkan jembatan kereta api dan jembatan biasa. Di Wonogiri tanggal 21 September 1948 didirikan oleh PKI "Pemerintah Tentara dan Rakyat", yang meliputi daerah Sukoharjo. Juga PKI menggledah rumah para anggota Masyumi, PNI dan GRR. Kediri merupakan pusat Komando Brigade 29 (kesatuan-kesatuan pemberontak dengan batalyon-batalyonnya).

Pada tanggal 21 September 1948, Batalyon Maladi Yusuf melarikan diri ke Ngadirejo, karena TNI mengadakan pembersihan dan perlucutan. Gerakan mereka dapat dilumpuhkan oleh TNI sehingga dapat dikuasai kembali. Di Kediri diadakan jam malam mulai pukul 16.00 sampai pukul 06.00. Semua kantor pemerintahan dijaga oleh TNI.

Pergolakan PKI juga terjadi didaerah Surabaya. Begitu juga di Blitar, sekitar kawedanan Lodoyo, Srengat dan Wlingi, pergolakan tersebut dapat diatasi oleh polisi negara.

Di Bojonegoro terjadi insiden pertempuran diluar kota oleh orang-orang PKI. Orang-orang PKI membongkar rumah penjara Mojoarum, 8 km. dari Bojonegoro dan 36 tahanan melarikan diri. Sejumlah 9 orang pegawai rumah penjara diculik.

Dalam buku Sejarah Kabupaten Madiun disimpulkan bahwa ada tiga cara pembunuhan PKI terhadap lawan dan tawanan politik yang sangat mengerikan dan diluar peri kemanusiaan.

1. Pembunuhan agar tidak diketahui dan didengar oleh sesama tawanan, dengan jalan satu persatu dibakar hidup-hidup, disiksa sampai mati, dipenggal atau disembelih batang lehernya;
2. Pembunuhan dengan terang-terangan agar didengar sesama tawanan dengan jalan secara satu persatu atau berkelompok ditembak dekat kuburan darurat dengan senapan otomatis;

3. Pembunuhan dengan membabi buta, dengan cara sambil menggiring, sekelompok tawanan itu ditembak dengan senapan otomatis. Cara inilah yang menyebabkan beberapa korban berhasil bersandiwara pura-pura mati yang kemudian melarikan diri pada saat malam hari tiba dan tanpa pengawalan untuk mencari jalan agar dapat menghirup kembali udara kebebasan.

Sebelum dibunuh, mereka diperintahkan keluar dari rumah tawanan dengan tangan terikat dan pakaian ditanggalkan (kecuali pakaian dalam) tidak pandang pria ataupun wanita, sedangkan barang perhiasan dirampas".¹¹²

Kekejaman dan kebiadaban PKI menimbulkan korban yang sangat mengerikan. Disalah satu gedung di kota Madiun ditemukan tawanan PKI yang telah menjadi mayat karena disayat-sayat dan ditembak sehingga tidak mungkin dikenal bentuknya lagi. Lantai gedung itu tergenang darah setebal 2 cm.¹¹³ PKI menangkap semua pimpinan Masyumi dan PNI kemudian dibunuh tanpa pemeriksaan lebih dahulu. Lebih-lebih korban yang ditimbulkan oleh "Barisan Warok Ponorogo" yang memasuki kota Madiun. Dimana saja anggota-anggota Masyumi dan PNI serta orang-orang yang dicurigai, tanpa ampun ditembak mati kemudian kepalanya dipisahkan dari badannya dengan klewang. Korban-korban yang dicincang dan mengerikan itu menjadi pemandangan kota Madiun, yang berhamparan disepanjang jalan raya. Pembunuhan besar-besaran berjalan terus dimana saja selama dalam kekuasaan komunis.¹¹⁴

Dengan demikian kekejaman-kekejaman yang diperbuat oleh PKI diluar peri kemanusiaan itu adalah benar-benar seja-

¹¹²Sejarah Kabupaten Madiun, Op.Cit. hal.313-314

¹¹³Nasution A.H., Op.Cit. hal.335

¹¹⁴Loc.Cit.

lan dengan pokok-pokok doktrin ideologi komunis yang sangat membahayakan bagi kemanusiaan dan bangsa.